



SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DALAM ERA OTONOMI DAERAH
(Studi Kasus di Kabupaten Bogor)

T E S I S

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

**Rona Rositawati, SH
B4A 007 033**

PEMBIMBING :

**Prof. Dr. Miyasto, SU.
Noor Rahardjo, SH.,MHum.**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2009**

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DALAM ERA OTONOMI DAERAH
(Studi Kasus di Kabupaten Bogor)

Disusun Oleh,

**Rona Rositawati,SH
NIM. B4A 007 033**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal**

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. Miyasto, SU.

NIP. 130 516 585

Noor Rahardjo, SH. M.Hum.

NIP. 130 675 153

Mengetahui
Ketua Program

Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto,S.H.,MH.

NIP. 130 531 702

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan ini saya, Rona Rositawati, menyatakan bahwa karya Ilmiah/ tesis ini adalah asli hasil karya saya sendiri dan karya Ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata satu (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Diponegoro maupun Perguruan Tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam Karya Ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari Karya Ilmiah/ Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Semarang, 31 Desember 2008
Penulis

Rona Rositawati
NIM. B4A 007 033

MOTTO

Ketika bertiup angin yang teramat kencang, maka terdapatlah tiga golongan manusia :

*Yang pertama,
Orang-orang yang berlari ketakutan.*

*Yang kedua,
Orang-orang yang mendirikan dinding kokoh untuk mempertahankan diri.*

*Yang ketiga,
Orang-orang yang membangun windmill untuk merubah angin kencang menjadi energi*

Berusahalah untuk selalu menjadi golongan ketiga dalam situasi apapun...

PERSEMBAHAN

***Kupersembahkan karya kecilku
untuk suamiku tercinta, anakku tersayang, serta
yang kuhormati kedua orang tuaku.....***

KATA PENGANTAR

Selaksa Puji dan Syukur hanya pantas dihaturkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha segala Maha. Dengan karunia-Nya, Alhamdulillah pengumpulan data, analisa, serta penyusunan tesis ini dapat dirampungkan dengan lancar.

Tesis ini mengulas tentang sistem pemungutan pajak daerah dalam era otonomi daerah sebagai suatu studi kasus yang terjadi di Kabupaten Bogor.

Selain sebagai syarat kelulusan S2 Program Magister Hukum di Universitas Diponegoro, tesis ini ditulis karena kesadaran penyusun tentang pentingnya dasar yuridis dalam memungut pajak dan sistem pemungutan pajak daerah. Serta penerapan otonomi daerah yang membawa dampak perubahan bagi pengaturan sektor perpajakan daerah.

Tentunya dalam melakukan semua itu penyusun tidak sendirian. Untuk itu pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Diponegoro Semarang
2. Prof. Dr. Paulus Hadi Suprpto, SH.MH. selaku ketua Program Magister Ilmu hukum Universitas Diponegoro Semarang, yang telah mengesahkan penulisan tesis ini.

3. Sekretaris Akademik, Ibu Ani Purwanti, SH, M Hum dan Bapak.,Ibu staf Administrasi yang banyak menunjang dan membantu kelancaran dalam menempuh program ini.
4. Para Guru besar dan staf pengajar Program Magistar Ilmu Hukum UNDIP yang telah memberikan perkuliahan secara professional, arif dan bijaksana dalam memberikan ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
5. Bapak Prof. Dr. Miyasto, S.U. Selaku pembimbing I, dan Bapak Noor Rahardjo,SH.M.Hum, selaku pembimbing II penulis, dimana beliau yang telah banyak memberikan masukan, nasihat, serta bimbingan hingga selesainya tesis ini.
6. Pemerintah Kabupaten Bogor yang telah memberikan beasiswa kepada penulis untuk menempuh Program Megister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro Semarang.
7. Pimpinan dan beserta Staf Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor yang telah bersedia membantu penulis ketika melakukan penelitian.
8. Rekan - rekan Program Magister Ilmu Hukum Angkatan 2007, yang telah mendukung dan membantu dalam menyelesaikan studi di Program Magistar Ilmu Hukum UNDIP.
9. Suamiku tercinta Kapten. Czi. Yaenurendra H.A.P, ST dan Anakku tersayang Rasendriya Muhammad Laksita A.P. yang dengan

sepenuh hati menemani, memberikan doa dan *support* untuk segera menyelesaikan studi ini.

10. Kedua orang tua penulis, Bapak/ Ibu H. Suyadi dan Bapak/Ibu H. Andjar Subagyo, terima kasih atas doa dan restu yang diberikan.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian sejak awal sampai penulisan tesis ini selesai.

Penyusun berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat baik bagi penyusun sendiri maupun pembaca yang berkenan mempelajarinya.

Penyusun menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, dan tentunya masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.

Semarang, Desember 2008

Penyusun

ABSTRAK

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DALAM ERA OTONOMI DAERAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN BOGOR)

Latar belakang penelitian adalah perlunya dasar hukum yang kuat bagi pemerintah untuk memungut pajak kepada masyarakat, dalam era otonomi daerah maka pajak sebagai salah satu sumber pembangunan daerah. Adanya peraturan-peraturan daerah yang mengatur pajak daerah apakah sudah konsisten dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban mengenai bagaimana dasar hukum sistem pemungutan pajak daerah dalam era otonomi daerah, bagaimana sistem pemungutan pajak daerah dalam era otonomi daerah, bagaimana konsistensi antara peraturan daerah yang mengatur pajak daerah dengan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk meneliti persoalan-persoalan hukum dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, dalam penelitian ini untuk meneliti sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada itu sinkron atau serasi satu sama lain. Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder. Data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif atau disebut dengan analisis data kualitatif normatif.

Hasil penelitian ini adalah terdapat 2 (dua) sistem yang dianut dalam pemungutan pajak daerah dalam era otonomi daerah, yaitu melalui penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak, belum ada konsistensi antara peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah.

Perlunya revisi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal lebih efektif.

Kata kunci : Sistem Pemungutan Pajak Daerah, Otonomi Daerah.

ABSTRACT

LOCAL TAXATION SYSTEM OF LOCAL AUTONOMY ERA (CASE STUDY IN BOGOR REGENCY)

Background of this research was the law basic need for country in order to collect the tax to their society, in local outonomy era therefore tax as one of local development resourse. Was the local rules existence which regulates local tax already consistent with Act Number 34, 2000 about alteration of Acts Number 18, 1997 about both Local Taxation and Local Retribution.

This research was to found the answers about how was the basic law of local tax collection system on local autonomy era, how local taxation system in local autonomy era, how was the consistence of between local regulation that arrange the local taxation and acts regulation of local taxation sector.

This research used normative juridical approximation to analyze law problem by examine literature object that include secondary data, in this research was to analyze so far that written positive law exist both synchronize or matching each other. This research was analyze discription research used secondary data. Obtained data analyzed qualitatively or called normative qualitative data analysis.

This research result was consist 2 systems determining Local Head or own paid by Taxpayer, there were no consistency yet between local regulation and acts regulation in local sector.

Need revition Acts Number 34, 2000 about Local Taxation and Local Retribution therefore implementation local outonomy and fiscal desentralitation more effectif.

Keywords : Local Taxation System, Local Autonomy

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kerangka Pemikiran.....	13
F. Metode Penelitian	25
1. Metode Pendekatan.....	26
2. Spesifikasi Penelitian.....	27
3. Jenis Data	28
4. Teknik Pengumpulan Data	28
5. Teknik Analisa Data.....	29
G. Sistematika Penulisan.....	29
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 31
A. Pengertian Pajak.....	31
B. Asas dan Teori Pemungutan Pajak	35
C. Teknik Pemungutan Pajak.....	47
D. Pajak Daerah	49
D.1. Pengertian Pajak Daerah	49
D.2. Jenis Pajak Daerah	52
D.3. Objek Pajak Daerah	55
D.4. Subjek dan Wajib Pajak Daerah.....	56
E. Retribusi Daerah	57
E.1. Pengertian Retribusi Daerah	57
E.2. Objek Retribusi Daerah	58
 F. Negara Hukum dan Otonomi Daerah	 59
F.1. Negara Hukum	59
F.2. Otonomi Daerah.....	63

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	67
A. Gambaran Umum Kabupaten Bogor	67
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	71
B.1. Dasar Hukum Sistem Pemungutan Pajak Daerah dalam Era Otonomi Daerah	71
B.2. Sistem Pemungutan Pajak Daerah dalam Era Otonomi Daerah	88
B.3. Konsistensi antara peraturan daerah yang mengatur pajak daerah dengan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah	125
BAB IV PENUTUP.....	133
A. Kesimpulan	133
B. Saran.....	137
DAFTAR PUSTAKA.....	139

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan didirikannya Negara adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, meningkatkan harkat dan martabat rakyat untuk menjadi manusia seutuhnya. Demikian juga Negara Republik Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat mempunyai tujuan dalam menjalankan pemerintahannya. Pembangunan di segala bidang dilakukan untuk membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Tujuan bangsa Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Alenia IV, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Untuk mencapai tujuan tersebut dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa suatu negara memerlukan beberapa unsur pendukung, salah satunya adalah tersedianya sumber penerimaan yang memadai dan dapat diandalkan. Sumber-sumber penerimaan ini sangat penting untuk menjalankan kegiatan dari masing-masing tingkat pemerintahan, karena tanpa adanya penerimaan yang cukup maka program-program pemerintah tidak akan berjalan secara

maksimal. Semakin luas wilayah, semakin besar jumlah penduduk, semakin kompleks kebutuhan masyarakat maka akan semakin besar dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Selain dari itu, dalam rangka efektifitas pelaksanaan pembangunan di segala bidang, demi tercapainya keselarasan dan keseimbangan seluruh kegiatan pembangunan, maka diperlukan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu tidak semua urusan pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah pusat, akan tetapi daerah diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Maka sistem pemerintahan negara Indonesia yang merupakan negara kesatuan berbentuk republik, dibentuk pemerintahan daerah sesuai Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Perkembangan Pemerintahan Daerah di Indonesia sudah dimulai sejak Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1903 dengan mengeluarkan *Desentralisatie Wet* merupakan dasar hukum pertama berkaitan desentralisasi di Indonesia, yang memberi keleluasaan dalam pelaksanaan implementatif kebijakan desentralisasi untuk dan di Hindia Belanda.

Desentralisatie Wet 1903 merupakan hasil amandemen parsial dari RR 1854 dengan cara memberikan tambahan tiga pasal baru di antara pasal 68 dan Pasal 69 RR 1854. Pada dasarnya perundang-undangan desentralisasi dimaksudkan untuk membuka kemungkinan terwujudnya

pemerintahan lokal di daerah-daerah tertentu atau di bagian-bagian dari satuan-satuan daerah tertentu, yang dapat melaksanakan urusan pemerintahannya sendiri ¹

Pada masa pendudukan pemerintahan militer Jepang pada Perang Dunia II tahun 1942 telah memberikan perubahan beberapa aspek kehidupan hukum di Indonesia. Dimaklumatkannya 3 (tiga) Oendang-oendang oleh pemerintah Jepang, salah satunya adalah Oendang-Oendang No. 28 merupakan produk hukum yang mempunyai konsekuensi cukup panjang. Karena berdasarkan kekuatan undang-undang yang satu ini tatanan pemerintahan kolonial yang di dasarkan kepada asas desentralisasi (sebagaimana telah diupayakan bertahun-tahun oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda) menjadi berakhir. ²

Penyelenggaraan otonomi daerah pada era setelah kemerdekaan Indonesia, diawali dengan terbitnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah. Kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 merupakan Undang-Undang Pokok tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang yang berlaku selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

¹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Desentralisasi dalam Tata Pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda (Kebijakan dan Upaya Sepanjang Babak Akhir Kekuasaan Kolonial di Indonesia 1900-1940)*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hal 16

² *Ibid*, hal 102

Pada masa reformasi, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Diberlakukannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mengubah sistem sentralisasi pemerintahan yang terjadi sebelumnya ke arah desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab kepada daerah.³ Sistem pemerintahan yang bersifat desentralisasi, selain memudahkan koordinasi kekuasaan dan pemerintahan juga mengakomodasi kondisi bangsa Indonesia. Wilayah kepulauan yang luas dan keanekaragaman budaya bangsa Indonesia, sehingga dibutuhkan pelaksanaan pemerintahan yang disesuaikan dengan ciri dan kebiasaan dari masing-masing daerah.

Dijelaskan juga dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dibidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggarannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

³ H.A.W. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 14.

Meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah memiliki tujuan yang ideal, sebagaimana tertuang dalam penjelasan umumnya. Namun perjalanan otonomi daerah dengan berlakunya Undang-Undang tersebut hanya mampu bertahan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun akibat adanya perubahan dinamis dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia.

Berbekal kekurangan pada pelaksanaan otonomi daerah sebelumnya, maka pada tahun 2004, pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Demikian juga Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 digantikan dengan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, khususnya di dalam penjelasan umum angka 6 (enam), akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara

Pemerintah dan Daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada Daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Salah satu komponen utama pelaksanaan desentralisasi dalam otonomi daerah adalah desentralisasi fiskal (pembiayaan otonomi daerah)⁴. Apabila pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif, dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik, maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk *surcharge of taxes*, Pinjaman, maupun dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat.⁵

Sumber keuangan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Sedangkan pendapatan daerah menurut Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 bersambung dengan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bersumber dari : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan. Adapun pembiayaan menurut Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 bersumber dari : sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan Asli Daerah menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

⁴ Tjip Ismail, *Pengaturan Pajak Daerah Indonesia*, Yellow Printing, Jakarta, 2007, hal 12.

⁵ Machfud Sidik, Makalah Seminar Nasional, "*Desentralisasi Fiskal, Kebijakan, Implementasi dan Pandangan ke Depan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*", Yogyakarta, 20 April 2002, hal. 5.

bersambung dengan Pasal 157 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bersumber dari : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dari pendapatan asli daerah, menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 bersambung dengan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ditetapkan dengan Undang-Undang, yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. Kedua pasal tersebut merupakan penegasan dari apa yang telah diatur oleh konstitusi tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen, khususnya Pasal 23A yang menegaskan, bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Tujuan daripada reformasi terhadap peraturan perundang-undangan pajak dan retribusi daerah adalah untuk menyederhanakan dan memperbaiki jenis dan struktur perpajakan daerah, meningkatkan pendapatan daerah, memperbaiki sistem administrasi perpajakan daerah dan retribusi daerah sejalan dengan sistem administrasi perpajakan nasional, mengklasifikasikan retribusi, dan menyederhanakan tarif pajak dan retribusi.

Dalam perkembangan selanjutnya, sebagai penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dilakukan perubahan dengan dilahirkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Karena lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tersebut masih berlatar belakang kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut merupakan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijaksanaan dan arahan bagi Daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum perpajakan Daerah dan retribusi Daerah.

Perbedaan mendasar antara pajak dan retribusi adalah terletak pada timbal balik langsung. Untuk pajak tidak ada timbal balik langsung kepada para pembayar pajak, sedangkan untuk retribusi ada timbal balik langsung kepada pembayar retribusi. Pajak daerah dapat diartikan biaya yang harus dikeluarkan seseorang atau suatu badan untuk menghasilkan pendapatan disuatu daerah, karena ketersediaan berbagai sarana dan prasarana publik yang dinikmati semua orang tidak mungkin ada tanpa adanya biaya yang dikeluarkan dalam bentuk pajak tersebut. Pajak merupakan pungutan yang bersifat memaksa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas pekerjaan jasa milik daerah dan jasa lainnya yang diberikan oleh pemerintah dan mendapatkan imbalan fasilitas secara langsung bagi pengguna jasa, lebih spesifik kepada orang-orang tertentu yang mendapatkan pelayanan tersebut. Nampak perbedaan yang cukup signifikan antara pajak daerah dan retribusi daerah.

Berkaitan dengan pajak daerah di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur mengenai jenis dari pajak daerah dan tata cara pemungutannya yang diatur secara umum. Sedangkan objek, subjek, dan dasar pengenaan pajak diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut, jenis-jenis pajak daerah yang boleh dipungut oleh daerah adalah sebagai berikut :

1. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir.

Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dapat menetapkan jenis pajak daerah selain sebagaimana tersebut diatas melalui Peraturan Daerah asalkan memenuhi kriteria sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Implementasi atas lahirnya undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah tersebut dalam rangka mendorong pelaksanaan desentralisasi daerah yang lebih baik, maka Kabupaten Bogor telah menetapkan Peraturan Daerah sebagai peraturan pelaksanaan dalam pemungutan pajak di daerah Kabupaten Bogor. Adapun peraturan daerah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kab. Bogor Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel;
2. Peraturan Daerah KabupatenBogor Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;

6. Peraturan Daerah Kab.Bogor Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan; dan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pajak Sarang Burung Walet.

Di dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah, Pemerintah daerah secara horisontal selain berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, juga berdasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Selain itu, juga berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, Kepmendagri, 8 (delapan) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor tentang Pajak Daerah maupun peraturan di bawahnya. Namun diantara peraturan-peraturan tersebut terdapat hal-hal yang tidak konsisten sehingga perlu dikaji lebih lanjut.

Hal ini cukup menarik untuk diteliti, berkaitan dengan pengaturan sistem pemungutan pajak daerah apakah sudah sejalan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam Penelitian Tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar hukum sistem pemungutan pajak daerah dalam era otonomi daerah ?
2. Bagaimana sistem pemungutan pajak daerah dalam era otonomi daerah ?
3. Bagaimana konsistensi antara peraturan daerah yang mengatur pajak daerah dengan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah?

C. Tujuan Penelitian

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui dasar hukum sistem pemungutan pajak daerah dalam era otonomi daerah.
- b. Untuk menganalisis sistem pemungutan pajak daerah dalam era otonomi daerah.
- c. Untuk menganalisis dan mempelajari konsistensi antara peraturan daerah yang mengatur pajak daerah dengan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk keperluan yang bersifat teoritis terutama bagi kalangan akademis dan berguna untuk kepentingan yang bersifat praktis terutama bagi para pengambil kebijakan pemerintah.

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi informasi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam Hukum Administrasi Negara khususnya Hukum Pajak.

b. Secara praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada masyarakat dan pemerintah daerah tentang pelaksanaan sistem pemungutan pajak daerah dalam era otonomi daerah
- 2) .Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah daerah dan legislatif dalam merumuskan peraturan daerah yang menyangkut pajak daerah

E. Kerangka Pemikiran

Dalam negara hukum modern tugas pokok negara tidak saja terletak pada pelaksanaan hukum, tetapi juga mencapai keadilan sosial (*sociale gerechtigheid*) bagi seluruh rakyat. Sebagai negara berdasar atas hukum, negara Indonesia didirikan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Selain itu adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Upaya memajukan kesejahteraan umum – obyektif

yang membuat negara Indonesia terkategori sebagai negara hukum modern (*moderne rechtsstaat*) ataupun bercorak *welfare state* (*welvaarstaat; wohlfahrtsstaat*) – ditujukan untuk merealisasikan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual.⁶ Sehubungan dengan hal tersebut, terkandung makna bahwa negara atau pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban yang mutlak untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat. Untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat tersebut, pajak berperan sangat sentral dalam memenuhi kebutuhan anggaran untuk itu.

Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, cita desentralisasi senantiasa menjadi bagian dalam praktik pemerintahan Negara. Pasal 18 UUD RI 1945 perubahan kedua tahun 2000, ditegaskan bahwa pemerintah terdiri atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang, langkah-langkah penting sudah dilakukan oleh Pemerintah, seperti lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Melalui undang-undang tersebut bangsa Indonesia menyelenggarakan pemerintahan daerah dalam sistem administrasi pemerintahannya.⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dalam undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa :

⁶ Tjip Ismail, *Op.Cit.* Hlm.73.

⁷ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Gramedia, Jakarta, 2007, hal. 7.

“Daerah otonom, atau yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Sementara pendapat The Liang Gie seperti dikutip oleh Hanif Nurcholis menjelaskan bahwa :

“Otonomi daerah adalah wewenang untuk menyelenggarakan kepentingan sekelompok penduduk yang berdiam dalam suatu lingkungan wilayah tertentu yang mencakup mengatur, mengurus, mengendalikan, dan mengembangkan berbagai hal yang perlu bagi kehidupan penduduk.”⁸

Berdasarkan asas umum pemerintahan, yang menjadi urusan pemerintahan daerah meliputi hal berikut :

1. Bidang legislasi, yakni atas prakarsa sendiri membuat peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah.
2. Masalah perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

⁸ Ibid, hal 30

3. Perencanaan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.⁹

Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah diberikan kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah. Dengan demikian pungutan daerah itu meliputi pajak daerah dan retribusi daerah.

Jenis pajak kabupaten/kota yang dipungut adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan c, dan pajak parkir.

Dasar hukum pemungutan pajak daerah adalah hukum pajak daerah (Peraturan Daerah), dengan batasan pada Pasal 5A ayat (2) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Syarat yang ditentukan adalah peraturan daerah yang di pergunakan untuk mengatur Pajak Daerah substansinya harus selaras dengan substansi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Demikian juga dalam pasal 4 ayat (3) menyebutkan Peraturan Daerah yang dibuat dan dipergunakan sebagai dasar pemungutan pajak daerah sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai nama, objek, dan subjek pajak; dasar pengenaan pajak, tarif, dan cara perhitungan pajak; wilayah pemungutan; penetapan; tata cara pembayaran dan penagihan; kadaluarsa.

⁹ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2008, hal 9

Bangsa Indonesia sebagai Negara hukum maka dalam segala tindakannya juga harus berdasarkan atas aturan hukum termasuk bidang perpajakan. Hal ini menjadi syarat mutlak untuk memungut pajak dari masyarakat karena pemungutan pajak yang tidak didasari hukum adalah perampokan. Ketentuan Pasal 23A UUD RI 1945 bahwa Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara harus diatur dengan undang-undang, merupakan landasan yuridis konstitusional bagi Negara untuk memungut pajak.

Pengertian hukum pajak secara umum terdapat beberapa pendapat Menurut Rochmat Soemitro menyatakan bahwa :

“Hukum pajak ialah suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Hukum pajak menerangkan : siapa wajib pajak (subyek) dan apa kewajiban-kewajiban mereka terhadap pemerintah, hak-hak pemerintah, obyek-obyek apa yang dikenakan pemerintah, cara penagihan, cara pengajuan keberatan-keberatan, dan sebagainya.”¹⁰

Hukum Pajak dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formal. Perbedaan ini berdasarkan pada pemikiran bahwa yang menimbulkan hutang pajak adalah hukum pajak material dan bukan hukum pajak formal. Menurut Jajat Djuhadiat, dijelaskan sebagai berikut :

a. Hukum Pajak Material

Hukum pajak material adalah hukum pajak yang memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum

¹⁰ Mustaqiem, *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah*, FH UII Press, 2008, hal.230.

yang harus dikenakan pajak atau dapat dikatakan pula segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak, serta hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak, yaitu mengenai subjek pajak, wajib pajak, obyek pajak dan tarif.

b. Hukum Pajak Formal

Hukum Pajak Formal ialah hukum pajak yang memuat peraturan-peraturan mengenai cara-cara hukum pajak material menjadi kenyataan.¹¹ antara lain adalah mengenai surat pemberitahuan, surat ketetapan pajak, surat tagihan, pembukuan, surat keberatan/minta banding, pembayaran/penagihan pajak (dengan paksa), cara menghitung pajak, sanksi administrasi, ketentuan hukum pidana, penyidikan dan lain-lain.

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro, dalam bukunya Pajak dan Pembangunan, seperti dikutip R. Santoso Brotodihardjo bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak menurut R. Santoso Brotodihardjo adalah :

1. Pajak dipungut berdasarkan/ dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya *kontraprestasi individual* oleh pemerintah.

¹¹ Jajat Djuhadiat S, *Modul DPT III Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta : Departemen Keuangan-BPLK, 1993), hal 15.

3. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi *pengeluaran-pengeluaran pemerintah*, yang bila dari pemasukannya masih terdapat *surplus*, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai *tujuan yang tidak budgeter*, yaitu mengatur.¹²

Fungsi pajak menurut Rochmat Soemitro¹³ ada 3, yaitu :

1. Fungsi Budgeter;
2. Fungsi Mengatur;
3. Untuk menanggulangi Inflasi;

Fungsi yang pertama, dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut : "... pajak-pajak mempunyai tujuan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara, dengan maksud untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Dikatakan bahwa pajak dalam hal demikian mempunyai fungsi budgeter."¹⁴ Untuk menguatkan pendapat tersebut, ditunjukkan bahwa dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), pajak-pajak Daerah dan pajak Pemerintah Pusat yang diserahkan kepada Daerah, disamping subsidi, merupakan sumber pendapatan daerah yang penting.

Sedangkan fungsi yang kedua merupakan alat untuk mencapai tujuan tertentu, seperti alat untuk menarik modal, yaitu dengan menerbitkan undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal

¹² R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1995, hal.6

¹³ Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, PT. Eresco, Bandung. 1988. Cetakan-2, hal .2 s.d.

3. ¹⁴ *Ibid*, hal .2

Dalam Negeri (sekarang kedua undang-undang tersebut telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal);memberikan pembebasan pajak (*tax holiday*) atau dengan memberikan Keringanan Pajak, dengan tarif yang lebih rendah daripada biasanya;alat untuk mendorong digunakannya bentuk Koperasi sebagai bentuk usaha dengan cara membebaskan dari pengenaan pajak untuk jangka waktu 10 tahun dihitung sejak saat didirikannya; untuk memberikan proteksi terhadap barang-barang industri produksi dalam negeri, dengan mengenakan barang-barang import dengan pajak yang tinggi.

Adapun fungsi ketiga, yaitu pajak juga dapat digunakan untuk menanggulangi inflasi ini, dimana dapat dilakukan apabila tepat penggunaannya, sehingga merupakan alat yang ampuh untuk mengatur perekonomian negara.

Pajak yang dijadikan sebagai sasaran studi dapat didekati dari berbagai sudut,¹⁵ seperti :

1. Segi Ekonomi, mempelajari pajak dalam dampak ekonominya terhadap masyarakat, pengaruh pajak terhadap penghasilan seseorang, pengaruh pajak terhadap pola konsumsi, pengaruh pajak terhadap harga pokok, pengaruh pajak terhadap permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*);
2. Segi Pembangunan, disini pajak-pajak akan dinilai fungsinya dan dikaji dampaknya terhadap pembangunan;
3. Segi Penerapan Praktis, yang diutamakan adalah penerapannya, siapa yang dikenakan, apa yang dikenakan, berapa besarnya pajak, bagaimana cara menghitungnya, tanpa banyak menghiraukan segi hukumnya, apakah ada kepastian hukum;
4. Segi Hukum, lebih menitik beratkan kepada perikatan (*verbinten*is), pada hak dan kewajiban wajib pajak, subjek pajak dalam hubungannya dengan subjek hukum. Hak penguasa untuk mengenakan pajak.

¹⁵ *Ibid*, hal. 4 s.d. 5

Timbulnya hutang pajak, hapusnya hutang pajak, penagihan pajak dengan paksa, sanksi administratif maupun sanksi pidana, penyidikan, pembukuan. Soal keberatan, soal minta banding, ordonansi Keputusan, daluwarsa.

Berkaitan dengan pemungutan pajak, Smith (1723-1790) dalam Santoso menguraikan asas pemungutan pajak yang lebih dikenal dengan ***The Four Maxims***, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pembagian tekanan pajak di antara subjek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya masing-masing, di bawah perlindungan pemerintah (asas pembagian/asas kepentingan). Dalam asas "*equality*" ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama wajib pajak, dalam keadaan yang sama, para wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula;
2. Pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus terang (***certain***) dan tidak mengenal kompromis (*not arbitrary*). Dalam asas "*certainty*" ini, kepastian hukum yang dipentingkan adalah yang mengenai subjek objek, besarnya pajak, dan juga ketentuan mengenai waktu pembayarannya;
3. "*Every tax ought to be levied at the time, or in the manner, in which it is most likely to be convenient for the contributor to pay it*". Teknik pemungutan pajak yang dianjurkan ini (yang juga disebut "*convenience of payment*") menetapkan bahwa pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para wajib pajak, yaitu saat

sedekat dekatnya dengan detik diterimanya penghasilan yang bersangkutan;

4. *“Every tax ought to be so contrived as both to take out and to keep out of the pockets of the people as little as possible over and above what it brings into to public treasury of the State”*. Asas efisiensi ini menetapkan bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya; jangan sekali-kali biaya pemungutan melebihi pemasukan pajaknya.¹⁶

Sebagaimana diuraikan di atas, dengan demikian pemungutan pajak yang dilakukan, setidaknya harus memperhatikan 4 asas pokok pemungutan, yaitu adanya keseimbangan dan keadilan **“equality”**, adanya kejelasan **“certainty”** atas substansi dari pungutan, ketepatan pelaksanaan pembayaran **“convenience of payment”**, dan efisiensi pemungutan.

Pajak Daerah Kabupaten dan Kota, oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 2 ayat (2) telah disebutkan jenisnya, terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan c, dan pajak parkir. Dengan Peraturan Daerah, kepada Daerah diberikan kewenangan untuk :

1. Menetapkan jenis pajak lain selain sebagaimana tersebut diatas, setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pasal 2 ayat (4), yang secara lengkap dikutip sebagai berikut :

¹⁶ R. Santoso Brothodihardjo, *Op.Cit*, hlm. 27-28

- a. Bersifat pajak dan bukan Retribusi;
 - b. Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - c. Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
 - d. Obyek pajak bukan merupakan obyek pajak Provinsi dan/atau obyek pajak Pusat;
 - e. Potensinya memadai;
 - f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
 - g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan
 - h. Menjaga kelestarian lingkungan.
2. Menetapkan jenis dan tarif pajak daerah [pasal 3 ayat (3) bersambung dengan pasal 4 ayat (1)]

Sejalan dengan kriteria Undang-undang Nomor 34 tahun 2000, terdapat kriteria dari K.J. Davey, memberikan beberapa kriteria umum tentang perpajakan terutama di daerah :

- 1. Kecukupan dan Elastisitas : penerimaan dari suatu pajak harus menghasilkan penerimaan yang cukup besar sehingga diharapkan mampu membiayai sebagian atau keseluruhan biaya pelayanan yang akan dikeluarkan.

2. Pemerataan : Prinsipnya adalah beban pengeluaran pemerintah daerah haruslah dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupannya.
3. Kelayakan administrasi : Berbagai jenis pajak ataupun pungutan di daerah sangat berbeda-beda mengenai jumlah, integritas, dan keputusan yang diperlukan dalam administrasinya. Untuk itu, diperlukan administrasi perpajakan yang mudah dan sederhana.
4. Kesepakatan politis : Pada akhirnya, keputusan pembebanan pajak sangat bergantung pada kepekaan masyarakat, pandangan masyarakat secara umum tentang pajak, dan nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat di suatu daerah. Oleh karenanya dibutuhkan suatu kesepakatan bersama bila dirasakan perlu dalam pengambilan keputusan perpajakan.
5. Distorsi terhadap perekonomian : Implikasi pajak atau pungutan yang secara minimal berpengaruh terhadap perekonomian. Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban, baik bagi konsumen maupun produsen. Persoalannya, jangan sampai suatu pajak atau pungutan menimbulkan beban tambahan (*extra burden*) yang berlebihan, sehingga akan merugikan masyarakat secara menyeluruh (*dead-weight loss*).¹⁷

¹⁷ Raksaka Mahi, *Tinjauan terhadap UU No. 34 Tahun 2000. Secara Teori dan Praktek serta Arah Perubahannya*, Makalah Workshop : "Dampak Pelaksanaan UUNo. 34 Tahun 2000 Terhadap Dunia Usaha/ Iklim investasi dan Arah Perubahannya", Jakarta, 21 Februari 2002.

Berdasarkan cara pemungutannya Pajak Daerah kabupaten/kota dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu :

- a. Pajak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu, misalnya Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir.
- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja, misalnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C.¹⁸

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana untuk memperkuat dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Penelitian pada dasarnya merupakan, “suatu upaya pencarian” bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu obyek yang mudah terpegang, di tangan.¹⁹ Untuk itu tujuan utamanya adalah menambah dan memperluas pengetahuan guna memperkuat teori-teori yang sudah ada atau juga menemukan teori baru, sehingga sebuah penelitian dilakukan secara sistematis, konsisten dan metodologis. Secara sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu, metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu.

¹⁸ Wirawan B.Ilyas & Richard Burton, *Hukum Pajak Edisi 3*, Salemba Empat, Jakarta, 2007, hal 19.

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 27

Menurut Soerjono Sukanto, penelitian secara ilmiah artinya suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.²⁰

Sedangkan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.²¹ Metodologi menjadi cukup penting karena metode pada prinsipnya memberikan pedoman tentang cara peneliti untuk mempelajari dan menganalisa permasalahan yang dihadapi.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yang merupakan studi dokumen, menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dalam penelitian ini yang diteliti adalah sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada itu sinkron atau serasi satu sama lain. Hal ini dapat dilakukan melalui 2 (dua) jalur, yaitu :

- a. Vertikal, melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain apabila dilihat dari

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2007, hal 2.

²¹ Ibid, hal 43

sudut vertikal atau hierarki peraturan perundang-undangan yang ada.

- b. Horisontal, apabila yang ditinjau adalah peraturan perundang-undangan yang berkedudukan sederajat dan yang mengatur bidang yang sama.²²

Kegiatan dalam penelitian hukum normatif meliputi :

- a. Memilih pasal-pasal yang bersifat norma hukum.
- b. Menyusun sistematika dari pasal-pasal tersebut sehingga menghasilkan klasifikasi tertentu.
- c. Menganalisis pasal-pasal tersebut dengan menggunakan asas-asas hukum yang ada.
- d. Menyusun suatu konstruksi dengan persyaratan :
 - 1) Mencakup semua bahan hukum yang diteliti
 - 2) Konsisten
 - 3) Memenuhi syarat-syarat estetis
 - 4) Sederhana²³

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yakni suatu penelitian yang berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian ini.

²² Bambang Sunggono, *Op. Cit.* hal 94 - 96.

²³ Ronny Hanijito Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hal 33.

3. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data yang berasal dari : Data Sekunder. Data sekunder diperoleh dari bahan pustaka dan dokumentasi merupakan data dasar dalam penelitian hukum normatif, yang menjadi pijakan untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Apabila dilihat dari sisi kekuatan mengikatnya data sekunder di bidang hukum dapat dibedakan menjadi :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, meliputi : Perubahan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah.
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih lanjut hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer, meliputi, bahan hukum yang diperoleh dari teks, jurnal, kasus-kasus, disertasi, hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan. Dalam hal ini, alat pengumpul data kepustakaan dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, dapat dilakukan dengan melihat dan memperoleh buku-buku referensi mengenai pajak daerah, laporan-laporan hasil penelitian terdahulu, karya-karya ilmiah lainnya.

6. Teknik Analisa Data

Dalam melakukan analisa data, maka data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif atau bersifat analisis data kualitatif normatif atau studi dokumenter dengan menggunakan buku-buku literatur yang berhubungan dengan sistem pemungutan pajak dalam era otonomi daerah. Data yang telah dianalisis ini kemudian akan disajikan dalam sebuah penulisan tesis.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil penelitian, maka setelah dianalisis akan dibuat suatu laporan hasil penelitian yang sistematikanya tersusun dalam 4 (empat) bab sebagai berikut :

Bab I merupakan Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian yang meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data.

Bab II merupakan Tinjauan Pustaka akan diuraikan melalui kerangka pemikiran tentang pengertian pajak, asas dan teori pemungutan pajak, teknik pemungutan pajak, pajak daerah, jenis pajak daerah, obyek, subyek, wajib pajak daerah, retribusi daerah, obyek retribusi daerah, Negara hukum dan otonomi daerah.

Bab III merupakan Hasil penelitian dan analisis, melalui data-data yang terkumpul selama penelitian baik data primer maupun sekunder kemudian

dianalisis melalui metode yang digunakan, maka dalam bab ini akan diuraikan dasar hukum sistem pemungutan pajak daerah dalam era otonomi daerah, sistem pemungutan pajak daerah dalam era otonomi daerah, konsistensi antara peraturan daerah yang mengatur pajak daerah dengan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah.

Bab IV merupakan Penutup meliputi kesimpulan dari masing-masing fokus penelitian dan saran-saran yang bersifat konstruktif yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pajak

Pada hakekatnya pengertian pajak berbeda-beda tergantung dari sudut pandang mana kita memandang masalah pajak ini, namun substansi dan tujuannya sama. Sampai saat ini tidak ada pengertian pajak yang sifatnya universal, maka masing-masing sarjana yang melakukan kajian terhadap pajak memberikan pengertian sendiri.

Para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan batasan atau definisi yang berbeda-beda mengenai pajak, namun demikian berbagai definisi tersebut mempunyai inti atau tujuan yang sama dan ada beberapa definisi yang diungkapkan oleh para pakar antara lain :

1. P.J.A. Adriani (pernah menjabat guru besar dalam hukum pajak pada Universitas Amsterdam, kemudian Pemimpin International Bureau of Fiscal Documentation, juga di Amsterdam) yang dalam R. Santoso Brotodihardjo, dikemukakan sebagai berikut ²⁴:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

²⁴ R. Santoso Brotodihardjo, SH. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Refika Aditama, Bandung. Cet Pertama Edisi Keempat, 2003.Hal.2.

Kesimpulan yang dapat ditarik dan definisi tersebut adalah, bahwa Adriani memasukkan pajak sebagai pengertian yang dianggapnya sebagai suatu species ke dalam genus pungutan (jadi, pungutan adalah lebih luas). Dalam definisi ini titik berat diletakkan pada fungsi *budgeter* dari pajak, sedangkan pajak masih mempunyai fungsi lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu fungsi mengatur.

Yang dimaksud dengan tidak mendapat prestasi-kembali dan negara ialah prestasi khusus yang erat hubungannya dengan pembayaran “iuran” itu. Prestasi dari negara, seperti hak untuk mempergunakan jalan-jalan umum, perlindungan dan penjagaan dari pihak polisi dan tentara, sudah barang tentu diperoleh oleh para pembayar pajak itu, tetapi diperolehnya itu tidak secara individual dan tidak ada hubungannya langsung dengan pembayaran itu. Buktinya: orang yang tidak membayar pajak pun dapat pula mengenyam kenikmatannya.

2. Sommerfeld, memberikan pengertian bahwa pajak adalah suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah berdasarkan peraturan tanpa suatu imbalan kembali yang langsung dan seimbang, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya dalam menjalankan pemerintahan.²⁵
3. Definisi Prancis dalam R. Santoso Brotodihardjo (2003) dikatakan, termuat dalam buku Leroy Beaulieu yang berjudul *Traite de la Science des Finances*, 1906, berbunyi²⁶ :

²⁵ Muqodim, *Perpajakan Buku Satu*, UII Press, Yogyakarta, 1999, hal 1.

²⁶ R. Santoso Brotodihardjo, *Op. Cit*, hal 3.

“L' impot et la contribution, soit directe soit dissimulee, que La Puissance Publique exige des habitants ou des biens pur subvenir aux depenses du Gouvernement.”

“Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah.”

4. Menurut Deutsche Reichs Abgaben Ordnung (RAO-1 919), berbunyi²⁷:

“Steuern sind einmalige oder laufende Geldleistungen die nicht eine Gegenleistung fur eine besondere Leistung darstellen, und von einem offentlichrechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einkunften allen aufenlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft an den das Gesetz die Leistungspflicht knupft.”

“Pajak adalah bantuan uang secara insidental atau secara periodik (dengan tidak ada kontraprestasinya), yang dipungut oleh badan yang bersifat umum (= negara), untuk memperoleh pendapatan, di mana terjadi suatu tatbestand (= sasaran pemajakan), yang karena unclang undang telah menimbulkan utang pajak.”

5. M.J.H. Smeets dalam bukunya *De Economische Betekenis der Belastingen*, 1951, adalah²⁸: Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adakalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Dalam bukunya ini Smeets mengakui bahwa definisinya hanya menonjolkan fungsi *budgeter* saja; baru kemudian ia menambahkan fungsi mengatur pada definisinya.

²⁷ Ibid

²⁸ Erly Suandi, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2000, hal. 7

6. Definisi Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul “Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong”, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1964 dikatakan²⁹ : Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

7. Definisi Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam bukunya Dasar Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan adalah sebagai berikut³⁰:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”, dengan penjelasan sebagai berikut: “Dapat dipaksakan” artinya: bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan; terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal-balik tertentu, seperti halnya dengan retribusi.

Yang tersimpul dalam berbagai definisi selain definisi Dr. Soeparman yang memang membuka ide baru itu adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

²⁹ Ibid. Hal 7

³⁰ R. Santoso Brotodihardjo, *Op. Cit*, hal 6.

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgeter, yaitu mengatur.

B. Asas dan Teori Pemungutan Pajak

Mengenai tujuan hukum pada umumnya, kita pernah mendengar ajaran berbagai sarjana, Aristoteles yang telah terkenal dalam bukunya, *Rhetorica*, menganggap bahwa hukum bertugas membuat adanya keadilan.

Demikian pula dalam hukum pajak karena pada hakekatnya pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor negara, dan dapat dipaksakan. Maka agar tidak menimbulkan perlawanan, pemungutan pajak harus memenuhi beberapa syarat antara lain :

1. Membuat adanya keadilan dalam soal pemungutan pajak (Asas Keadilan)

Asas keadilan ini harus senantiasa dipegang teguh, baik dalam prinsip mengenai perundang-undangnya maupun dalam prakteknya sehari-hari. Inilah sendi pokok yang seharusnya diperhatikan baik-baik oleh setiap negara untuk melancarkan usahanya mengenai pemungutan pajak. Maka dari itu, syarat mutlak bagi pembuat undang undang (pajak), juga syarat mutlak bagi aparatur setiap pemerintah yang

berkewajiban melaksanakannya, adalah pertimbangan-pertimbangan dan perbuatan-perbuatan yang adil pula.

Syarat keadilan dapat dibagi menjadi :

- a. Keadilan horisontal, wajib pajak mempunyai kemampuan membayar (gaya pikul) sama harus dikenakan pajak yang sama.
- b. Keadilan vertikal, wajib pajak mempunyai kemampuan membayar (gaya pikul) tidak sama harus dikenakan pajak yang tidak sama.³¹

Dalam mencari keadilan, salah satu jalan yang harus ditempuh ialah mengusahakan agar supaya pemungutan pajak diselenggarakan secara umum dan merata. Artinya bahwa pajak dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar (*ability to pay*) pajak tersebut, dan sesuai dengan manfaat yang diterimanya.

Di atas telah diuraikan bahwa hukum pajak harus mengabdikan kepada keadilan. Lepas dari kenyataan bahwa pada pelaksanaannya pembuat undang-undang pajak harus selalu memegang teguh kepada asas keadilan, seringkali juga dipersoalkan, apakah pemungutan pajak oleh suatu negara berdasarkan pula atas keadilan. Apa dasar hukumnya, maka ada kewajiban membayar pajak, dengan perkataan lain: atas dasar apakah maka negara seakan-akan memberikan hak kepada diri sendiri untuk membebani rakyat dengan yang disebut pajak itu. Maka sejak abad ke-18 timbullah teori-teori guna memberikan dasar-

³¹ Erly Suandy, *Op Cit*, hal 17

menyatakan-keadilan (*justification*) kepada hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya, antara lain :

1) Teori Asuransi (*Verzeringstheory*)

Teori ini menyatakan bahwa termasuk dalam tugas negara untuk melindungi orang dan segala kepentingannya: keselamatan dan keamanan jiwa, juga harta bendanya. Sebagaimana juga halnya dengan setiap perjanjian asuransi (pertanggungan), maka untuk perlindungan tersebut di atas diperlukan pembayaran premi, dan di dalam hal ini, pajak inilah yang dianggap sebagai preminya, yang pada waktu-waktu yang tertentu harus dibayar oleh masing-masing. Hal inilah yang menjadi kelemahan dari teori asuransi, karena:

(1) dalam hal timbul kerugian, tidak ada suatu penggantian dari negara,

(2) antara pembayaran jumlah-jumlah pajak dengan jasa-jasa yang diberikan oleh negara, tidaklah terdapat hubungan yang langsung, namun teori ini oleh para penganutnya dipertahankan, sekadar untuk memberikan dasar hukum kepada pemungutan pajak saja.

Pembayaran pajak tidak dapat disamakan dengan pembayaran premi oleh seseorang kepada perusahaan pertanggungan.

2) Teori Kepentingan (*Belangentheory*)

Teori ini dalam ajarannya yang semula, hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari penduduk seluruhnya. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan

orang masing-masing dalam tugas-tugas pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk juga perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Maka sudah selayaknya bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menunaikan kewajibannya, dibebankan kepada seluruh penduduk tersebut.

Terhadap teori ini pun juga mulai ditinggalkan sebab dalam ajarannya pajak dikacaukan pula dengan retribusi. Hal ini menjadi sulit karena besar kecilnya kepentingan masyarakat dihubungkan dengan tugas atau jasa pelayanan negara.

3) Teori Gaya Pikul

Yang menjadi pokok pangkal teori ini pun adalah asas keadilan, yaitu tekanan pajak itu haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang, dan sekadar untuk mengukur gaya pikul ini, dapatlah dipergunakan, selain besarnya penghasilan dan kekayaan, juga pengeluaran atau pembelanjaan seseorang. Hingga kini teori ini masih dipertahankan oleh kebanyakan sarjana terkemuka dalam lapangan hukum pajak.

Mr. J.H.R. Sinninghe Damste pernah mencoba untuk menguraikan segala sesuatu semata-mata dengan gaya pikul ini dalam bukunya mengenai pajak pendapatan (pajak yang penting), bahwa selain daripada gaya pikul, harus pula diperhatikan kepentingan-kepentingan yang lain dari para wajib pajak.

W.J. de Langen berpendapat dalam bukunya, *De Grondbeginselen van het Ned. Belastingrecht*, Jilid I, 1954, bahwa asas gaya pikul hingga kini masih tetap merupakan asas yang terpenting dalam hukum pajak, walaupun tidak dapat disangkal, bahwa ada asas-asas lain, yang semenjak tahun 1919 semakin menduduki tempat yang utama pula, seperti asas perolehan utama dan asas kenikmatan. Maka asas gaya pikul ini menjelmakan cita-cita untuk mendapatkan tekanan yang sama atas individu, seimbang dengan luasnya pemuasan kebutuhan yang dapat dicapai oleh seseorang. Dalam pada itu pemuasan kebutuhan yang diperlukan untuk kehidupan yang mutlak harus diabaikan, dan sisanya inilah yang disamakannya dengan gaya pikul seseorang. Karena perkataan “dapat”, maka tabungan-tabungan seseorang termasuk pula ke dalam pengertian gaya pikulnya.

Mr. A.J. Cohen Stuart, sarjana yang telah memperdalam penyelidikan mengenai gaya pikul ini, dalam disertasinya menyamakan gaya pikul dengan sebuah jembatan, yang pertama-tama harus dapat memikul bobotnya sendiri sebelum dicoba untuk dibebaninya, dan menyarankan ajaran, bahwa yang sangat diperlukan untuk kehidupan, harus tidak dimasukkan ke dalam pengertian gaya pikul. Kekuatan untuk menyerahkan uang kepada negara barulah ada, jika kebutuhan-kebutuhan primer untuk hidup telah tersedia. Hak manusia yang pertama adalah hak untuk hidup. Maka hak pertama bagi setiap manusia yang dinamakan hak asas “minimum kehidupan” ini harus

pertama-tama diperhatikan, seperti memang ternyata dengan pajak-pajak atas pendapatan dan kekayaan di hampir semua negara.

Teori ini mencoba mencari dasar keadilan dalam memungut pajak yang harus dinyatakan sama beratnya untuk setiap orang, namun tidak menjawab atau membenarkan mengapa suatu negara memungut pajak.

4) Teori Kewajiban Pajak Mutlak atau Teori Bakti

Berlawanan dengan ketiga teori di atas, yang tidak mengutamakan kepentingan-kepentingan negara di atas kepentingan warganya, maka teori ini berdasarkan atas paham *Organische Staatsleer*, sehingga diajarkanlah olehnya bahwa justru karena sifat negara inilah maka timbullah hak mutlak untuk memungut pajak. Orang-orang tidak berdiri sendiri; dengan tidak adanya persekutuan, tidaklah akan ada individu. Oleh karenanya maka persekutuan itu (yang menjelma dalam negara) berhak atas satu dan lain. Rakyat harus sadar bahwa pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban asli untuk membuktikan tanda baktinya kepada negara dalam bentuk pembayaran pajak.

Dalam bukunya *Beginnselen van de Belastingheffing* maka W.H. van de Berge (pada waktu menulis: Wakil Direktur Jenderal Pajak, Nederland) sebagai penganut teori ini mengutarakan, bahwa negara sebagai *groepsverband* (organisasi dari golongan) dengan memperhatikan syarat-syarat keadilan, bertugas menyelenggarakan kepentingan umum, dan karenanya dapat dan harus mengambil

tindakan-tindakan yang diperlukannya, termasuk juga tindakan-tindakan dalam lapangan pajak.

Jadi menurut teori ini dasar hukum pajak terletak dalam hubungan rakyat dengan negara, yang memungut pajak daripadanya. Teori ini juga mengandung kelemahan bahwa negara merupakan lembaga yang bersifat otoriter sehingga kurang memperhatikan unsur keadilan dalam persetujuan pemungutan pajak.

5) Teori Asas Gaya Beli

Teori ini tidak mempersoalkan asal-mulanya negara memungut pajak, melainkan hanya melihat kepada efeknya, dan dapat memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya.

Menurut teori ini maka fungsi pemungutan pajak jika dipandang sebagai gejala dalam masyarakat, dapat disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga-rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara, dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya ke arah tertentu. Teori ini mengajarkan, bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak; bukan kepentingan individu, juga bukan kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya itu. Dapatlah kiranya disimpulkan disini, bahwa teori ini

menitikberatkan ajarannya kepada fungsi kedua dari pemungutan pajak, yaitu fungsi mengatur.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan hukum (Asas Yuridis)

Hukum pajak harus dapat memberi jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun untuk warganya. Maka mengenai pajak di negara hukum segala sesuatu harus ditetapkan dalam undang-undang. Juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia dicantumkan (dalam pasal 23 ayat 2), bahwa pengenaan dan pemungutan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan undang-undang.

Rasionya mengapa pengenaan pajak harus berdasarkan undang-undang adalah sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor rakyat ke sektor pemerintah (untuk membiayai pengeluaran negara); untuk itu tidak dapat ditunjuk kontraprestasi secara langsung terhadap individu. Padahal peralihan kekayaan dari satu sektor ke sektor yang lain tanpa adanya kontraprestasi, hanya dapat terjadi bila terjadi suatu hibah (wasiat).

Kemungkinan yang lain adalah, bahwa bilamana peralihan kekayaan itu terjadi karena kekerasan/paksaan, yaitu dalam peristiwa perampasan atau perampokan. Itulah sebabnya maka di Inggris berlaku suatu dalil yang berbunyi: *"No taxation without representation"*, dan di Amerika: *"Taxation without representation is robbery"*.

Selain secara formal harus dipungut berdasarkan/dengan undang-undang, dalam menyusun undang-undangnya nyata-nyata harus diusahakan oleh pembuat undang-undang tercapainya keadilan dalam pemungutan pajak dengan mengindahkan keempat unsur dari Adam Smith's Canon. Karenanya, niscaya tidak lagi cara-cara lama akan terulang, yaitu untuk Fiskus hanya dicantumkan haknya, dan untuk wajib pajak hanya kewajibannya saja; kedua duanya harus diatur rapi pada pihak masing-masing. In concreto secara umum tidak boleh dilupakan hal-hal sebagai berikut:

Pertama : Hak-hak Fiskus (yaitu Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai) yang telah diberikan oleh pembuat undang undang harus dijamin dapat terlaksananya dengan lancar;

Kedua: Sebaliknya para wajib pajak harus pula mendapat jaminan hukum, agar supaya ia tidak diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh Fiskus dengan aparaturnya. Segala sesuatu harus diatur dengan terang dan tegas, bukan hanya mengenai kewajiban-kewajiban, melainkan juga mengenai hak-hak wajib pajak.

Ketiga : jaminan terhadap tersimpannya rahasia-rahasia mengenai diri atau perusahaan-perusahaan wajib pajak yang telah dituturkannya kepada instansi-instansi pajak, dan yang harus tidak disalahgunakan oleh para pejabatnya.

3. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu perekonomian (Asas Ekonomis)

Selain fungsi budgeter, pajak juga dipergunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, sehingga dalam pelaksanaan pemungutan pajak harus tetap terjaga keseimbangan kehidupan ekonomi rakyat. Maka politik pemungutan pajaknya :

- 1) Harus diusahakan supaya jangan sampai menghambat lancarnya produksi dan perdagangan.
- 2) Harus diusahakan supaya jangan menghalang-halangi rakyat dalam usahanya menuju ke kebahagiaan dan jangan sampai merugikan kepentingan umum.

Kesimpulannya adalah, bahwa keseimbangan dalam kehidupan ekonomi tidak boleh terganggu dengan adanya pemungutan pajak, sesuai dengan fungsi kedua dari pemungutan pajak, yaitu fungsi mengatur.

4. Pemungutan pajak harus sederhana (Asas Finansial)

Sistem pemungutan pajak yang sederhana dan mudah untuk dilaksanakan, akan sangat membantu masyarakat untuk menghitung sendiri jumlah pajaknya. Maka pemungutan pajak harus diusahakan seefektif dan seefisien mungkin.

Sesuai dengan fungsi budgeternya, maka sudah barang tentu bahwa biaya biaya untuk mengenakan dan untuk memungutnya harus sekecil-kecilnya, apalagi dalam bandingan dengan pendapatannya.

Sebab inilah hasil yang dicapainya, yang harus dapat menyumbang banyak dalam menutup pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh negara, termasuk juga biaya-biaya untuk aparaturnya sendiri. Sehingga pemungutan pajak harus mempertimbangkan biaya dan manfaatnya.

Selain itu, untuk menghindarkan tertimbunnya tunggakan-tunggakan pajak, haruslah selalu diteliti, apakah syarat-syarat penting telah dipenuhi untuk dapat memungut pajak dengan efektif. Syarat ini antara lain adalah, bahwa pengenaan pajak harus dilakukan pada saat yang terbaik bagi yang harus membayarnya, yaitu harus sedekat-dekatnya saatnya dengan saat terjadinya perbuatan, peristiwa, ataupun keadaan yang menjadi dasar pengenaan pajak itu, sehingga sangat mudahnya dibayar oleh orang-orang yang bersangkutan. Sistem ini sesuai pernyataan "*pay as you earn*", seperti telah dipraktekkan di Amerika Serikat dan Inggris.

Salah satu pedoman pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (terkenal dengan nama *Wealth of Nations*) melancarkan ajarannya sebagai asas pemungutan pajak yang dinamainya "*The Four Maxims*" atau "*The Four Canon*" dengan uraiannya sebagai berikut:

- 1) Pembagian tekanan pajak di antara subjek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu

seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya masing-masing, di bawah perlindungan pemerintah (asas pembagian/asas kepentingan). Dalam asas "*equality*" ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama wajib pajak, Dalam keadaan yang sama, para wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula.

- 2) Pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus terang (*certain*) dan tidak mengenal kompromis (*not arbitrary*). Dalam asas "*certainty*" ini, kepastian hukum yang dipentingkan adalah yang mengenai subjek objek, besarnya pajak, dan juga ketentuan mengenai waktu pembayarannya.
- 3) "*Every tax ought to be levied at the time, or in the manner, in which it is most likely to be convenient for the contributor to pay it*". Teknik pemungutan pajak yang dianjurkan ini (yang juga disebut "*convenience of payment*") menetapkan bahwa pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para wajib pajak, yaitu saat sedekat dekatnya dengan detik diterimanya penghasilan yang bersangkutan.
- 4) "*Every tax ought to be so contrived as both to take out and to keep out of the pockets of the people as little as possible over and above what it brings into to public treasury of the State*". Asas efisiensi ini menetapkan bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan

sehemat hematnya; jangan sekali-kali biaya pemungutan melebihi pemasukan pajaknya.³²

C. Teknik Pemungutan Pajak

Cara memungut pajak menurut Adriani dapat dibagi ke dalam tiga golongan:

1. Wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Contoh: Pajak Penghasilan 1984. Cara pembayaran dapat dilakukan dengan:
 - a. Meterai
 - b. Pembayaran ke kas negaraFiskus membatasi diri pada pengawasan, kadang-kadang insidental atau secara teratur.
2. Ada kerja sama antara wajib pajak dan Fiskus (tetapi kata terakhir ada pada Fiskus) dalam bentuk:
 - a. Pemberitahuan sederhana dari wajib pajak
 - b. Pemberitahuan yang lengkap dari wajib pajak
3. Fiskus menentukan sendiri (di luar wajib pajak) jumlah pajak yang terutang.

Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton dalam bukunya Hukum Pajak menyatakan bahwa pada dasarnya ada 4 (empat) macam sistem pemungutan pajak yaitu :

³² R. Santoso Brotodihardjo, *Op. Cit*, hal 27-28

- a. *Official assessment system* adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang.

Dengan sistem ini masyarakat (Wajib Pajak) bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh Fiskus. Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak.

- b. *Semi self assessment system* adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang.

Dalam sistem ini setiap awal tahun pajak Wajib Pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi Wajib pajak yang harus disetor sendiri. Baru kemudian pada akhir tahun pajak Fiskus menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.

- c. *Self assessment system* adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.

Dalam sistem ini Wajib pajak yang aktif sedangkan Fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali Wajib Pajak melanggar ketentuan yang berlaku.

- d. *Withholding system* adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/ memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. Pada sistem ini fiskus dan wajib pajak tidak aktif, fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan/ pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.³³

Pengertian pemungutan menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 13, adalah :

Suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, Penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

D. Pajak Daerah

D.1. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah

“Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat

³³ Wirawan B.Ilyas & Richard Burton, *Op.Cit*, hal. 22

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.”

Apabila memperhatikan prinsip umum perpajakan yang baik dengan bertitik tolak dengan pendapat Adam Smith dan ekonom-ekonom Inggris yang lain, maka menurut Musgrave haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Penerimaan/ pendapatan harus ditentukan dengan tepat;
- b. Distribusi beban pajak harus adil artinya setiap orang harus dikenakan pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya;
- c. Yang menjadi masalah penting adalah bukan hanya pada titik mana pajak tersebut harus dibebankan, tetapi oleh siapa pajak tersebut akhirnya harus ditanggung.
- d. Pajak harus dipilih sedemikian rupa untuk meminimumkan terhadap keputusan perekonomian dalam hubungannya dengan pasar efisien.
- e. Struktur pajak harus memudahkan penggunaan kebijakan fiskal untuk mencapai stabilitasi dan pertumbuhan ekonomi.
- f. Sistem pajak harus menerapkan administrasi yang wajar dan tegas/ pasti serta harus dipahami oleh wajib pajak.
- g. Biaya administrasi dan biaya-biaya lain harus serendah mungkin jika dibandingkan dengan tujuan-tujuan lain.³⁴

³⁴ Rochmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan I, PT. Eresco, Bandung, 1991, hal 15-16.

Untuk mempertahankan prinsip tersebut di atas, maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dari ongkos pemungutannya;
- b. Relatif stabil, artinya penerimaan pajak tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan ada kalanya menurun secara tajam;
- c. Basis pajaknya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (*benefit*) dan kemampuan untuk membayar (*ability to pay*).

Melihat definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Pajak daerah merupakan pajak dalam konteks daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota. Diatur berdasarkan Peraturan Daerah dan hasilnya untuk membiayai pembangunan daerah.

Dari segi kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak daerah, pajak daerah dibagi menjadi 2 (dua) yakni :

1. Pajak Daerah yang dipungut oleh provinsi
2. Pajak Daerah yang dipungut oleh Kabupaten /kota

Perbedaan kewenangan pemungutan antara pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yakni sebagai berikut :

1. Pajak provinsi kewenangan pemungutan terdapat pada Pemerintah Daerah Provinsi, sedangkan untuk pajak kabupaten/kota kewenangan pemungutan terdapat pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
2. Objek pajak kabupaten/kota lebih luas dibandingkan dengan objek pajak provinsi, dan objek pajak kabupaten/kota masih dapat diperluas berdasarkan peraturan pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Sedangkan pajak provinsi apabila ingin diperluas objeknya harus melalui perubahan dalam Undang-undang.

Perpajakan Daerah oleh **K. J. Davey**³⁵ dapat diartikan sebagai berikut:

1. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri;
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh Pemerintah Daerah.

D.2. Jenis Pajak Daerah

Kriteria Pajak daerah secara spesifik dapat diuraikan dalam 4 (empat) hal yakni :

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pengaturan yang dilaksanakan oleh daerah itu sendiri;

³⁵ K. J. Davey, *Pembiayaan Pemerintahan Daerah*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 39

2. Pajak yang dipungut berdasarkan pengaturan dari pemerintah pusat tetapi penetapan besarnya tarif pajak oleh pemerintah daerah;
3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah itu sendiri;
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat, tetapi hasil pemungutannya diberikan kepada pemerintah daerah.

Pajak daerah di Indonesia dapat di golongan berdasarkan tingkatan Pemerintah Daerah, yaitu pajak daerah tingkat Provinsi dan pajak daerah tingkat Kabupaten/Kota. Penggolongan pajak seperti tersebut di atas diatur dalam Undang-undang No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Pasal 2 ayat 1 dan 2) serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang obyek, subyek, dasar pengenaan pajak dan ketentuan tarif dari pajak daerah yang berlaku, baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.

Selanjutnya Pajak Daerah saat ini yang hak kewenangan pemungutnya dapat diklasifikasikan menurut wilayah pemungutan pajak dapat dibagi menjadi :

1. Pajak Daerah Provinsi, yaitu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi, terdiri dari :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
2. Pajak Daerah Kabupaten/Kota, yaitu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari :
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Reklame;
 - d. Pajak Hiburan;
 - e. Pajak Parkir;
 - f. Pajak Penerangan Jalan;
 - g. Pajak Pengambilan dan Pengelohan Bahan galian Golongan C.

Tarif pajak Provinsi yang berlaku dalam rangka keseragaman akan diatur dalam suatu peraturan pemerintah. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang pajak daerah provinsi yang seragam ditentukan dalam suatu peraturan pemerintah. Dalam hal ini, yang berlaku saat ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Sedangkan pajak daerah Kabupaten/Kota, khususnya yang menyangkut masalah tarif pajak Kabupaten/Kota ditentukan dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan perlakuannya sama dengan tarif yang terdapat dalam Undang-undang pajak daerah. Tarif tersebut merupakan tarif tertinggi yang dapat ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/kota dalam pemungutan pajak daerah.

D.3. Obyek Pajak Daerah

Pajak dapat dikenakan dengan satu syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah adanya objek pajak yang dimiliki atau dinikmati oleh wajib pajak. Pada dasarnya objek pajak merupakan manifestasi dari *taatbestand* (keadaan yang nyata). Dengan demikian, *taatbestand* adalah keadaan, peristiwa, atau perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dapat dikenakan pajak.³⁶ Kewajiban pajak dari seorang wajib pajak muncul (secara objektif) apabila ia memenuhi *taatbestand*. Tanpa terpenuhinya *taatbestand* tidak ada pajak terutang yang harus dipenuhi atau dilunasi.

Ketentuan dalam Undang-undang No.18 Tahun 1997 maupun Undang-undang No.34 Tahun 2000 tidak secara tegas dan jelas menentukan yang menjadi objek pajak pada setiap jenis pajak daerah. Penentuan mengenai objek pajak daerah terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

³⁶R. Santoso Brotodiharjo, *Op.Cit.* hal. 86

D.4. Subjek dan Wajib Pajak Daerah

Pengertian subjek dan wajib pajak daerah dalam pemungutan pajak daerah, merupakan dua istilah yang kadang disamakan walaupun sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda.

Dalam beberapa jenis pajak , subjek pajak identik dengan wajib pajak yakni setiap orang atau badan yang memenuhi ketentuan sebagai subjek pajak diwajibkan untuk membayar pajak sehingga secara otomatis menjadi wajib pajak seperti Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air. Sementara itu pada beberapa jenis pajak daerah, pihak yang menjadi subjek pajak (yaitu yang melakukan pembayaran pajak) tidak sama dengan wajib pajak, yaitu pengusaha hotel yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak), seperti Pajak Hotel.

Terminologi yang digunakan dalam Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah, yang dimaksud dengan :

1. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Dengan demikian, siapa saja baik orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat objeknya ditentukan dalam suatu peraturan daerah tentang pajak daerah, akan menjadi subjek pajak.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Oleh sebab itu, seseorang atau suatu badan menjadi wajib pajak apabila telah ditentukan oleh peraturan daerah untuk

melakukan pembayaran pajak, serta orang atau badan yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari subjek pajak.

Berdasarkan pengertian di atas menunjukkan bahwa wajib pajak dapat merupakan subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak maupun pihak lain, yang bukan merupakan subjek pajak, yang berwenang untuk memungut pajak dari subjek pajak.

E. Retribusi Daerah

E.1. Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Retribusi Daerah adalah :

“Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus dilediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”

Pada dasarnya retribusi sama dengan pajak, yang membedakan adalah imbalan atau kontraprestasi dalam retribusi langsung dapat dirasakan oleh pembayar. Unsur-unsur yang melekat dalam retribusi antara lain :

1. Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang;
2. Pungutannya dapat dipaksakan;
3. Pemungutannya dilakukan oleh Negara;
4. Digunakan sebagai pengeluaran masyarakat umum;

5. Imbalan atau prestasi dapat dirasakan secara langsung oleh pembayar retribusi.³⁷

E.2. Obyek Retribusi Daerah

Obyek Retribusi Daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Jenis jasa-jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan obyek retribusi maka oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi. Jasa-jasa tersebut dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan, yakni :

1. Retribusi Jasa Umum, obyeknya adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Retribusi Jasa Usaha, obyeknya adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
3. Retribusi Perizinan Tertentu, obyeknya adalah kegiatan tertentu Pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

³⁷ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Op.Cit*, hal.6.

F. Negara Hukum dan Otonomi Daerah

F.1. Negara Hukum

Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Republik Indonesia 1945 Perubahan ketiga tahun 2001 salah satunya adalah Negara Indonesia ialah Negara Hukum. Asas ini mengikat para pejabat negara dan seluruh rakyat Indonesia untuk menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Tindakan yang sewenang-wenang tanpa mengindahkan hukum yang ada, tidak boleh dilakukan oleh siapapun juga. Hukum yang berlaku hendaknya dibuat sedemikian rupa sesuai dengan rasa keadilan dan rasa hukum masyarakat.³⁸ Dalam perkembangannya negara hukum memiliki unsur-unsur yang dikemukakan oleh Julius Stahl, antara lain sebagai berikut :³⁹

- 1) Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat
- 2) Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perUndang-Undangan
- 3) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara)
- 4) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara
- 5) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif

³⁸Mashuri Maschab, *Sistem Pemerintahan Indonesia (Menurut UUD 1945)*, Bina Aksara, Jakarta, 1988 hal 4.

³⁹Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hal. 4. seperti yang dikutip dari buku Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni Bandung, 1992, hal 29-30, Buku Abdul Hakim G. Nusantra, *Politik Hukum Indonesia*, YLBHI, Jakarta, 1988, hal 12-14, Frans Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi, sebuah Telaah Filosofis*, Gramedia, Jakarta, 1997, hal 58-59.

- 6) Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau Warga Negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah
- 7) Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.

Selain itu, konsep negara hukum (*rule of law*) juga di sampaikan oleh **A.V. Dicey**, yang lahir dalam naungan sistem hukum anglo saxon. Dicey mengemukakan *unsur-unsur the rule of law* sebagai berikut⁴⁰:

- (a) Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*); tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.
- (b) Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat.
- (c) Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.

Sebagai bangsa merdeka dan berdaulat, perencanaan dan penetapan konsep mengenai sistem pengelolaan kehidupan berbangsa diserahkan sepenuhnya kepada sebuah bangsa sesuai dengan cita-cita untuk kehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.⁴¹ Secara teoritis bahwa semua bangsa menuangkan pokok-pokok pandangan, pendirian, prinsip konseptual, mengenai pengelolaan kehidupannya di dalam konstitusi, baik tertulis (*written*

⁴⁰ Ibid.hal 58-89

⁴¹ Solly Lubis, *Politik dan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1989, hal.2.

constitution) maupun tidak tertulis (*unwritten constitution*). Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis umumnya mengemukakan latar belakang hasrat bernegara, landasan filosofi kenegaraan, tujuan Negara, struktur organisasi dan mekanisme pemerintahan Negara yang diinginkan oleh bangsa yang mendirikan dan mempertahankan Negara itu.⁴²

Tipe negara hukum ini sering juga disebut negara hukum dalam arti yang luas atau disebut pula Negara Hukum Modern. Negara dalam pengertian ini bukan saja menjaga keamanan semata-mata tetapi secara aktif turut serta dalam urusan kemasyarakatan demi kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu pengertian negara hukum dalam arti materiel atau luas sangat erat hubungannya dengan pengertian Negara Kesejahteraan atau “*welfare state*”.

Negara Indonesia sebagai negara Hukum atau *rechtsstaat* yang mengutamakan kesejahteraan seluruh rakyat, dalam pengertian *Welfare State* tidak hanya mengutamakan kesejahteraan rakyat tetapi juga membentuk manusia Indonesia seutuhnya dalam mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Dengan memperhatikan UUD 1945 (Pembukaan, Batang Tubuh), jelas bahwa negara Indonesia merupakan Negara Hukum Kesejahteraan (Negara Hukum dalam arti materil) mempunyai tugas “*service Publik*” **Sjachran Basah** menyatakan bahwa “administrasi negara mengemban tugas negara yang khusus di lapangan penyelenggaraan kepentingan

⁴² Ridwan HR. *Op.Cit.* hal 4.

umum, untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang merata materiil serta spritual yang merupakan tugas servis public.⁴³ Tugas servis publik tersebut akan memberikan konsekuensi pengeluaran anggaran negara yang mengharuskan pemerintah berupaya untuk meningkatkan sumber penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak sebagai perwujudan partisipasi rakyat dalam pencapaian tujuan negara.

Selain itu sebagai Negara hukum, segala tindakan dan kebijakan bangsa ini juga harus berdasarkan atas aturan hukum termasuk bidang perpajakan. Hal ini menjadi syarat mutlak untuk memungut pajak dari masyarakat karena pemungutan pajak yang tidak didasari hukum adalah perampokan. Ketentuan Pasal 23A UUD RI 1945 bahwa Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara harus diatur dengan undang-undang, merupakan landasan yuridis konstitusional bagi Negara untuk memungut pajak.

Pengertian hukum pajak secara umum terdapat beberapa pendapat Menurut Rochmat Soemitro menyatakan bahwa :

“Hukum pajak ialah suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Hukum pajak menerangkan : siapa wajib pajak (subyek) dan apa kewajiban-kewajiban mereka terhadap pemerintah, hak-hak pemerintah, obyek-obyek apa yang dikenakan pemerintah, cara penagihan, cara pengajuan keberatan-keberatan, dan sebagainya.”⁴⁴

Hukum Pajak dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formal. Perbedaan ini berdasarkan pada

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Mustaqiem, *Op.Cit.* hal.230.

pemikiran bahwa yang menimbulkan hutang pajak adalah hukum pajak material dan bukan hukum pajak formal. Menurut Jajat Djuhadiat, dijelaskan sebagai berikut :

c. Hukum Pajak Material

Hukum pajak material adalah hukum pajak yang memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak atau dapat dikatakan pula segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak, serta hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak, yaitu mengenai subjek pajak, wajib pajak, obyek pajak dan tarif.

d. Hukum Pajak Formal

Hukum Pajak Formal ialah hukum pajak yang memuat peraturan-peraturan mengenai cara-cara hukum pajak material menjadi kenyataan.⁴⁵ antara lain adalah mengenai surat pemberitahuan, surat ketetapan pajak, surat tagihan, pembukuan, surat keberatan/minta banding, pembayaran/penagihan pajak (dengan paksa), cara menghitung pajak, sanksi administrasi, ketentuan hukum pidana, penyidikan dan lain-lain.

F.2. Otonomi Daerah

Perkembangan masyarakat Indonesia dalam memasuki era globalisasi dan reformasi telah memberikan pengalaman yang cukup berarti, antara lain kebijaksanaan di daerah yang diputuskan dari pusat

⁴⁵ Jajat Djuhadiat S, *Op.Cit*, hal 15.

berdasarkan pendekatan “*Top Down*” sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan di daerah, maka salah satu cara mengatasi ketidaksesuaian antara kebijaksanaan yang diputuskan dari pusat dan kondisi daerah adalah harus segera dibuat sebuah kerangka kebijaksanaan yang sangat strategis. Salah satu kebijaksanaan yang sangat strategis sesuai dengan kondisi saat ini adalah otonomi daerah.⁴⁶

Sejalan dengan hal tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Perundang-undangan tentang otonomi daerah yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian dilengkapi dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, meletakkan perubahan mendasar dengan melaksanakan kebijaksanaan desentralisasi.

Pengertian pemerintahan daerah menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Asas otonomi daerah yang artinya ialah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

⁴⁶ Syaukani, *Menatap Harapan Masa Depan Otonomi Daerah*, Gerbang Dayaku, Yogyakarta, 2000, hal 139-140

sesuai peraturan perundang-undangan.⁴⁷ Dengan daerah otonom dimaksudkan agar daerah dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri dan tidak bergantung pada Pemerintah Pusat, sehingga daerah harus mampu mengatur pendapatan dan pengeluarannya sendiri.

Sistem desentralisasi ini Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk membuat kebijakan dan mengatur rumah tangganya sendiri. Selain itu tujuan kebijakan desentralisasi yakni dalam rangka efisiensi alokasi arus barang publik ke daerah, serta untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat lokal guna mendorong demokratisasi, mengakomodasi aspirasi dan partisipasi masyarakat daerah.

Terdapat 3 (tiga) keuntungan yang dapat diperoleh dari kebijakan desentralisasi, yakni :

1. Memberikan peluang akses bagi Daerah setidaknya terhadap ketersediaan anggaran dalam APBN dan optimalisasi penerimaan Daerah;
2. Karena ingin mendekatkan kepada konstituen, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten berada pada posisi yang relative lebih baik daripada pemerintah Pusat dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas perpajakan pada sektor tertentu bagi perekonomian daerah;
3. Perlu diantisipasi adanya peningkatan akses kepada penerimaan daerah dan penguatan kewenangan perpajakan kepada Pemerintah

⁴⁷ Siswanto Sunarno, *Op.Cit*, hal. 6.

daerah dapat membantu meningkatkan mobilisasi sumber-sumber penerimaan daerah sejalan dengan meningkatnya penerimaan perpajakan nasional.⁴⁸

Sedangkan upaya yang paling dominan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga Pemerintah Daerah adalah dengan melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini cukup menentukan kelangsungan hidup dan otonomnya daerah yang bersangkutan.

⁴⁸ Jusuf Anwar, Seminar *Tantangan Implementasi Undang-Undang No. 32 dan 33 Tahun 2004 dalam Membangun Ekonomi Daerah*, Sheraton Mustika Hotel, Program Magister Ekonomika UGM, Yogyakarta, 4 Juni 2005, hal.5.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Bogor

Letak Kabupaten Bogor cukup strategis sebagai salah satu kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat. Selain dekat dengan Ibukota Negara juga memiliki potensi alam yang indah. Secara Geografis Kabupaten Bogor terletak antara $6^{\circ} 19' - 6^{\circ} 47'$ lintang selatan dan $106^{\circ} 1' - 107^{\circ} 103'$ bujur timur. Secara administratif, Kabupaten Bogor memiliki batas-batas :

- Sebelah utara : Kabupaten Tangerang, Kabupaten/Kota Bekasi dan Kota Depok.
- Sebelah Timur : Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Karawang
- Sebelah Selatan : Kabupaten Sukabumi dan Cianjur
- Sebelah Barat : Kabupaten Lebak Provinsi Banten serta di tengah-tengah terletak Kota Bogor.

Luas wilayah Kabupaten Bogor adalah 298.939,304 Ha. Terbagi dalam 428 Desa/Kelurahan, yang terdiri dari 411 Desa dan 17 Kelurahan, tercakup dalam 40 Kecamatan. Jumlah penduduk Kabupaten Bogor pada tahun 2006 menurut hasil Sensus Daerah (SUSDA) sebanyak 4.215.585 jiwa dan pada tahun 2007 telah mencapai 4.237.692 jiwa

(penyempurnaan hasil SUSDA melalui cokolit, 2007) atau 10,32 % dari jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat (40.737.594 jiwa).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Sumber pendapatan asli daerah terdiri atas : hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.⁴⁹

Sebagaimana telah diterangkan diatas, bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber PAD. yang kontribusinya sangat dominan di Kabupaten Bogor. Sebagai gambaran dikemukakan bahwa dari total pendapatan asli daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 sebesar Rp. 282.554.979.000,00, maka 54 % nya adalah bersumber dari pajak daerah, yaitu sebesar Rp. 151.279.977.000,00, baru menyusul dibelakangnya adalah retribusi daerah Rp. 98.875.219.000,00 (35 %), Lain-lain PAD yang sah Rp. 19.873.118.000,00 (7 %), dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp. 12.526.665.000,00 (4 %).

Sedangkan Pajak Daerah yang dipungut di Kabupaten Bogor meliputi :

1. Pajak Hotel, yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 15 Tahun 2002. Pajak Hotel adalah pajak yang

⁴⁹ Pasal 157 huruf a UU.No.32 Tahun 2004

dikenakan atas pelayanan yang disediakan hotel⁵⁰ dengan pembayaran oleh orang pribadi atau badan.

2. Pajak Restoran, yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2002. Pajak Restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan restoran⁵¹ dengan pembayaran oleh orang pribadi atau badan.
3. Pajak Hiburan, yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 17 Tahun 2002. Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan⁵² dengan dipungut bayaran.
4. Pajak Reklame, yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 18 Tahun 2002. Pajak Reklame adalah pajak yang dikenakan atas semua penyelenggaraan reklame⁵³ oleh orang pribadi atau badan.
5. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2002. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak

⁵⁰ Pasal 1 ayat (9) Perda No 15 Tahun 2002, Hotel adalah bangunan khusus disediakan untuk menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

⁵¹ Pasal 1 ayat (9) Perda No 16 Tahun 2002, Restoran adalah usaha penyediaan dan penjualan makanan dan minuman bertempat di sebagian atau seluruh bangunan, termasuk penyediaan penjualan makanan dan minuman yang diantar dan dibawa pulang.

⁵² Pasal 1 ayat (9) Perda No 17 Tahun 2002, Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga.

⁵³ Pasal 1 ayat (9) Perda No 18 Tahun 2002, Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.

yang dikenakan atas Pengambilan Bahan Galian Golongan C⁵⁴ oleh orang pribadi atau badan.

6. Pajak Parkir, yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 20 Tahun 2002. Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir⁵⁵ di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
7. Pajak Penerangan Jalan, yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 2002. Pajak Penerangan Jalan⁵⁶ adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan listrik baik berasal dari PLN⁵⁷ maupun bukan PLN.
8. Pajak Sarang Burung Walet, yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2002. Pajak Sarang Burung Walet⁵⁸ adalah pungutan daerah atas pengambilan sarang burung walet.⁵⁹

⁵⁴ Pasal 1 ayat (9) Perda No 19 Tahun 2002, Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan c dari sumber alam di dalam dan atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

⁵⁵ Pasal 1 ayat (9) Perda No 20 Tahun 2002, Tempat Parkir adalah tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

⁵⁶ Pasal 1 ayat (6) Perda No 23 Tahun 2002, Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

⁵⁷ Pasal 1 ayat (9) Perda No 23 Tahun 2002, Perusahaan Listrik Negara, yang selanjutnya disingkat PLN, adalah PT, Perusahaan Listrik Negara (Persero)

⁵⁸ Pasal 1 ayat (9) Perda No 24 Tahun 2002, Sarang Burung Walet adalah sarang yang dihasilkan burung walet *species collocalia*

⁵⁹ Pasal 1 ayat (10) Perda No 24 Tahun 2002, Pengambil Sarang Burung Walet yang selanjutnya disebut pengambil sarang adalah perorangan pengambilan sarang untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

B.1. Dasar Hukum Sistem Pemungutan Pajak Daerah dalam Era Otonomi

Setiap jenis pajak daerah yang diberlakukan di Indonesia harus mempunyai dasar hukum yang kuat untuk menjamin kelancaran pengenaan dan pemungutannya. Sesuai dalam penjelasan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 sebelum amandemen ditegaskan, bahwa penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan undang-undang, yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan undang-undang.

Pada awalnya, pajak daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 ini masih bernuansakan pada otonomi yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Hal ini terlihat pada penjelasan umumnya pada alenia kedua disebutkan, bahwa : “Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, pajak dan retribusi merupakan sumber pendapatan daerah agar Daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, di samping penerimaan yang berasal dari Pemerintah berupa subsidi/bantuan dan bagi hasil pajak dan bukan pajak.

Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat...”.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 merupakan undang-undang yang mencabut peraturan perundang-undangan pajak dan retribusi daerah yang lama, yaitu :

1. Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor 1934;
2. Ordonansi Pajak Potong 1936;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1947 tentang Pajak Radio;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1947 tentang Pajak Pembangunan I;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dan Daerah-daerah yang Berhak Mengurus Rumah Tangganya Sendiri;
6. Undang-Undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 tentang Pajak Bangsa Asing;
9. Undang-Undang Nomor 27 Prp. Tahun 1959 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing, dan Pajak Radio kepada Daerah.

Pencabutan terhadap peraturan perundang-undangan diatas didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah yang selama ini berlaku telah menyebabkan Daerah berpeluang untuk memungut banyak jenis pajak, beberapa diantaranya mempunyai biaya administrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan hasilnya dan atau hasilnya tidak memadai. Disamping itu, terdapat beberapa jenis pajak yang tidak memadai untuk dipungut Daerah karena tumpang tindih dengan pajak lain dalam arti terdapat pajak lain untuk jenis objek yang sama, menghambat efisiensi alokasi sumber ekonomi, bersifat tidak adil, atau tidak benar-benar bersifat pajak, tetapi bersifat retribusi;
2. Pungutan Retribusi yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah menunjukkan beberapa kelemahan, seperti :
 - a. Hasilnya kurang memadai jika dibandingkan dengan biaya penyediaan jasa oleh Daerah;
 - b. Biaya pemungutannya relatif tinggi;
 - c. Kurang kuatnya prinsip dasar retribusi terutama dalam hal pengenaan, penetapan, struktur, dan besarnya tarif;
 - d. Adanya beberapa jenis retribusi yang pada hakekatnya bersifat pajak karena pemungutannya tidak dikaitkan secara langsung dengan pelayanan pemerintah daerah kepada pembayar retribusi;

- e. Adanya jenis retribusi perizinan yang tidak efektif dalam usaha untuk melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan;
- f. Adanya jenis retribusi yang mempunyai dasar pengenaan atau objek yang sama.

Untuk itu, jenis-jenis retribusi perlu diklasifikasikan dengan kriteria tertentu, agar memudahkan penerapan prinsip dasar retribusi sehingga mencerminkan hubungan yang jelas antara tarif retribusi dengan pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah.

3. Besarnya penerimaan Daerah Tingkat I (sekarang Provinsi), yang berasal dari pajak dan retribusi cukup memadai, sedangkan penerimaan Daerah Tingkat II (sekarang Kabupaten/Kota) dari pajak dan retribusi masih relatif kecil. Keadaan ini kurang mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab dengan titik berat pada Daerah Tingkat II. Oleh karena itu perlu usaha peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari sumber pajak dan retribusi yang potensial dan yang mencerminkan kegiatan ekonomi daerah. Sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan penerimaan Daerah Tingkat II, diperkenalkan adanya jenis pajak baru, yaitu Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang dibagihasilkan dengan Daerah Tingkat I dengan imbalan sebagian besar untuk Daerah Tingkat II. Pajak ini dianggap sangat baik ditinjau dari segi potensinya karena konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor cukup besar dan setiap tahun selalu meningkat. Konsumsi bahan bakar kendaraan

bermotor tersebut mencerminkan kegiatan ekonomi daerah dan erat kaitannya dengan produk domestik regional bruto, pembangunan dan pemeliharaan jalan sehubungan dengan banyaknya kendaraan bermotor pengguna jalan.

4. Dalam rangka menata kembali beberapa jenis retribusi yang pada hakekatnya bersifat pajak serta untuk lebih memberi perhatian pada pelestarian lingkungan, maka retribusi pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dan retribusi pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan dinyatakan masing-masing menjadi pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, yang keduanya merupakan pajak Daerah Tingkat II, dengan pertimbangan untuk lebih memperkuat upaya peningkatan penerimaan Daerah Tingkat II dan mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab dengan titik berat pada Daerah Tingkat II.
5. Pengadministrasian beberapa jenis pajak dan retribusi pada masa sebelum dilahirkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dianggap belum dilakukan dengan baik sehingga realisasi penerimaannya lebih kecil dari yang semestinya. Untuk itu dilakukan penyederhanaan dan perbaikan jenis dan struktur perpajakan daerah, perbaikan sistem administrasi perpajakan daerah dan retribusi daerah sejalan dengan

sistem administrasi perpajakan nasional, mengklasifikasikan retribusi, dan menyederhanakan tarif pajak dan retribusi.

6. Pajak daerah dan pajak nasional merupakan satu sistem perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijaksanaan perpajakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. Sejalan dengan perpajakan nasional, maka pembinaan pajak daerah harus dilakukan secara terpadu dengan pajak nasional. Pembinaan harus dilakukan secara terus menerus, terutama mengenai objek dan tarif pajaknya supaya antara pajak pusat dan pajak daerah saling melengkapi.

Undang-Undang ini juga melakukan penyederhanaan terhadap peraturan perundang-undangan yang dicabut tersebut, dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan sehingga pada akhirnya tumbuh kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan retribusi.

Dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, diperhatikan dan dikaitkan dengan undang-undang lainnya, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.

Dalam perkembangannya, seiring dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah, yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Maka pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini sebagai salah satu bukti keseriusan Pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil usaha BUMD dan pendapatan asli daerah lainnya.

Adapun hal-hal yang diubah dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tersebut adalah :

1. jenis pajak daerah dan objek retribusi daerah;

Pajak daerah yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, meliputi :

- 1) Pajak Daerah Tingkat I (*sekarang Provinsi*), terdiri dari , Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- 2) Pajak Daerah Tingkat II (*sekarang Kabupaten/Kota*), terdiri dari, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Pajak daerah yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, meliputi :

- 1) Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- 2) Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir.

Selain itu menurut Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Daerah Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis pajak daerah selain yang telah ditetapkan secara

limitatif didalam undang-undang tersebut, setelah memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) Bersifat pajak dan bukan Retribusi;
- b) Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- c) Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
- d) Objek pajak bukan merupakan objek pajak Propinsi dan/atau objek pajak Pusat;
- e) Potensinya memadai;
- f) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
- g) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan
- h) Menjaga kelestarian lingkungan.

Berdasarkan uraian di atas tidak terdapat perubahan yang signifikan dari komposisi jenis pajak daerah kabupaten/kota, jenis pajak yang masih tetap adalah hiburan, reklame, dan pajak penerangan jalan. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Galian Golongan C berganti nama dengan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Pajak Hotel dan Restoran dipecah menjadi dua jenis pajak, pajak hotel dan pajak restoran, serta ada penambahan pajak baru, yaitu pajak parkir. Sedangkan Pajak Pengambilan Air Bawah

Tanah dan Air Permukaan yang semula merupakan jenis pajak Daerah Kabupaten/Kota menjadi pajak Daerah Propinsi.

2. peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah;

Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan daerah yang tidak dapat berlaku surut. Penetapan pajak daerah dan retribusi daerah ini tidak hanya terbatas pada jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditetapkan secara limitatif didalam undang-undang nomor 34 tahun 2000, tetapi Daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan jenis pajak daerah dan retribusi daerah lain sesuai dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria-kriteria sebagaimana yang telah diterangkan diatas.

3. prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi daerah.

Sesuai pasal 21 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk retribusi jasa umum, berdasarkan kebijakan Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan;
- b. Untuk retribusi jasa usaha, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- c. Untuk retribusi perizinan tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Substansi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 berbeda. Letak perbedaannya adalah dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dalam mengatur bidang perpajakan daerah menggunakan 2 (dua) sifat, ialah :

- 1) sifat *sentralistik* berarti bahwa penetapan objek pajak atau nama-nama pajak dan penetapan maksimal presentase tarif pajak daerah;
- 2) sifat *desentralistik* berarti bahwa dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis pajak daerah Kabupaten/ Kota selain yang ditetapkan dalam pasal 2 ayat (2). Hal tersebut memberikan kesempatan kepada Kabupaten/Kota meningkatkan pendapatan asli daerah dengan menciptakan landasan hukum pemungutan pajak daerah berdasarkan inisiatif daerah,

Sedangkan pengaturan perpajakan daerah menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 hanya bersifat *sentralistik* berarti bahwa Pemerintah pusat sebagai pihak yang menetapkan objek (nama) pajak daerah dan tarif maksimal pajak.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak banyak mengatur tentang sistem pemungutan pajak daerah, karena perubahannya hanya meliputi beberapa pasal. Sedangkan mengenai sistem pemungutan pajak daerah lebih banyak

diatur menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pemungutan Pajak Daerah, pengaturannya tidak dilakukan perubahan oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Seharusnya pengaturan pemungutan juga dilakukan perubahan menyesuaikan dengan semangat otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mengingat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 masih bernuansakan kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Pengaturan pemungutan pajak daerah yang memberikan kebebasan bagi daerah untuk memungut jenis pajak baru diluar yang telah ditetapkan secara limitatif oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 memberikan dampak pada tidak sedikit daerah dengan pertimbangan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah membuat jenis pajak daerah baru yang objeknya banyak duplikasi dengan objek yang telah dipungut oleh pajak pusat. Hal ini menjadi tidak seiring dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah yang menyebutkan bahwa dalam upaya meningkatkan PAD, Daerah dilarang :

- a. menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; dan
- b. menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor.

Dalam penjelasannya disebutkan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi adalah Peraturan Daerah yang mengatur pengenaan Pajak dan Retribusi oleh Daerah terhadap objek-objek yang telah dikenakan pajak oleh Pusat dan Provinsi, sehingga menyebabkan menurunnya daya saing Daerah. Sebagai contoh pungutan yang dapat menghambat kelancaran mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar-Daerah, dan kegiatan impor/ekspor antara lain adalah Retribusi izin masuk kota dan Pajak/Retribusi atas pengeluaran/pengiriman barang dari suatu daerah ke daerah lain.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 2 ayat (3) telah mengeluarkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Fungsinya sebagai peraturan pelaksanaan yang menjelaskan tentang objek, subjek, dasar pengenaan pajak dan ketentuan tarif dari pajak

daerah yang berlaku, baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Dalam perjalanannya oleh Menteri Dalam Negeri mengeluarkan beberapa keputusan yakni :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997, tentang Kriteria Wajib Pajak yang wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Pajak Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.

Menurut KJ.Davey, suatu jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah mungkin ditetapkan berdasar ketentuan perundang-undangan Pemerintah Pusat, yang pada gilirannya bisa bersifat memerintahkan atau mengizinkan.⁶⁰ Dengan kata lain Pemerintah Pusat dapat memerintahkan Pemerintah Daerah untuk memungutnya atau semata-mata memberikan wewenang untuk melaksanakannya. Sifat yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pajak daerah adalah bersifat mengizinkan untuk memungut pajak

⁶⁰ Mustaqiem, *Op.Cit*, hal. 272.

daerah (sebagai pelaksana teknis) meskipun daerah diberi hak membuat peraturan daerah yang akan dipergunakan sebagai landasan hukum pelaksanaan pemungutan pajak daerah. Kemudian dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 juga ditegaskan, bahwa pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 menetapkan materi muatan yang terkandung di dalam peraturan daerah. Materi muatan dalam peraturan daerah tentang pajak daerah, sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai : nama, objek, dan subjek pajak; dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak; wilayah pemungutan; masa pajak; penetapan; tata cara pembayaran dan penagihan; kedaluwarsa; sanksi administrasi; dan tanggal mulai berlakunya. Selain itu peraturan daerah tentang pajak daerah dapat juga mengatur ketentuan mengenai⁶¹ : pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya; tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa; dan asas timbal balik. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah tersebut sebelum ditetapkan harus terlebih dahulu disosialisasikan dengan masyarakat.

Sebelum otonomi daerah pemerintah daerah Kabupaten Bogor telah melakukan pemungutan pajak daerah, berdasarkan pada Undang-

⁶¹ Lihat Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000

undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adapun peraturan daerah tersebut adalah :

9. Peraturan Daerah Kab. Bogor Nomor 15 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
13. Pasal 5 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kab. Bogor Nomor 12 Tahun 1997 tentang Pajak Parkir;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pajak Penerangan Jalan.

Berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pemerintah daerah Kabupaten Bogor dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah juga mengganti Peraturan daerah tentang pajak daerah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Terdapat 8 (delapan) jenis Peraturan Daerah di Kabupaten Bogor yang mengatur mengenai pajak daerah, yakni:

1. Peraturan Daerah Kab. Bogor Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
6. Peraturan Daerah Kab.Bogor Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan; dan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pajak Sarang Burung Walet.

Peraturan Daerah tersebut menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah Kabupaten Bogor dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah kepada wajib pajak daerah di wilayah Kabupaten Bogor. Sehingga pemungutan pajak daerah yang dilakukan pemerintah daerah kepada warganya terdapat payung hukumnya. Dalam peraturan daerah tersebut diatur tentang subjek atau wajib pajak daerah, objek pajak daerah, dan tata cara pemungutan pajaknya.

B.2. Sistem Pemungutan Pajak Daerah dalam Era Otonomi Daerah

Kewenangan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Bogor dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 2004. Berdasarkan peraturan daerah tersebut, Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan kewenangan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan.⁶² Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor mempunyai fungsi : (1) perumusan kebijakan teknis operasional bidang pendapatan daerah; (2) pengkoordinasian dan penyusunan rencana penerimaan pendapatan daerah; (3) penggalian, peningkatan dan pengembangan sumber pendapatan daerah; (4) penyelenggaraan pemungutan pajak daerah; (5) pelaksanaan penagihan dan pengadministrasian penerimaan bagi hasil; (6) pembinaan teknis pemungutan pendapatan asli daerah; (7) pelaksanaan tugas pembantuan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan; (8) pengkoordinasian, monitoring, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pendapatan daerah; (9) pengkoordinasian serta pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi di bidang pendapatan daerah; (10) pembinaan terhadap UPTD; (11) pelaksanaan ketatausahaan Dinas.

⁶² Pasal 3 dan pasal 4 Perda Kab. Bogor Nomor 23 Tahun 2004.

Dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah, Dinas Pendapatan Daerah berpedoman kepada :

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997, tentang Kriteria Wajib Pajak yang wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Pajak Daerah;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
 9. Delapan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor tentang Pajak Daerah;
- dan

10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 7 ayat (1) pemungutan pajak daerah dilakukan dengan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Disini terlihat, bahwa ada 2 (dua) pilihan dalam pemungutan pajak, yaitu :

1. dilakukan dengan penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah
2. dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan.

Dokumen lain yang digunakan dalam pemungutan pajak daerah tersebut adalah Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding. Pengaturan lebih lanjut dalam pelaksanaan pemungutan, mengenai tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, dan Surat Keputusan Keberatan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.⁶³ Demikian pula mengenai tata cara pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, penerbitan Surat dalam pemungutan pajak daerah dapat digunakan pemungutan berdasarkan

⁶³ Lihat Pasal 8 ayat (1) UU.No.18 Tahun 1997.

penetapan Kepala Daerah (Bupati) atau Wajib Pajak membayar sendiri. Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.⁶⁴

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 mengatur berbeda mengenai pemungutan pajak daerah sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, dimana dalam pemungutan pajak daerah dengan penetapan Kepala Daerah maupun Wajib Pajak membayar sendiri, keduanya menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah sebagai dokumen dalam pendaftaran Wajib Pajak.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah sudah mengelompokkan berdasarkan jenis pajak yang ada di Kabupaten Bogor.

1. Pajak Daerah yang pemungutannya berdasarkan penetapan Bupati, yakni :

- a. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- b. Pajak Reklame
- c. Pajak Penerangan Jalan Non PLN dan
- d. Pajak Sarang Burung Walet.

⁶⁴ Ibid. Pasal 8 ayat (2).

2. Pajak Daerah yang pemungutan wajib pajak membayar sendiri, yakni :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan dan
- d. Pajak Parkir

Khusus untuk Pajak Penerangan Jalan yang bersumber dari PLN, pemungutan dilakukan kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dengan PT. PLN. Saat ini Wilayah Daerah Kabupaten Bogor di layani oleh 1 (satu) Distribusi Jakarta dan Tangerang, dan 2 (dua) Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) PT. PLN, yaitu APJ Depok dan APJ Bogor.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, bahwa pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah tersebut sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai⁶⁵ :

- 1. Nama, objek, dan subjek pajak;
- 2. Dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
- 3. Wilayah pemungutan;
- 4. Masa pajak;
- 5. Penetapan;
- 6. Tata cara pembayaran dan penagihan;
- 7. Kedaluwarsa;
- 8. Sanksi administrasi; dan

⁶⁵ Lihat Pasal 4 ayat (3) UU No. 34 Tahun 2000

9. Tanggal mulai berlakunya.

Selain dari itu, peraturan daerah tentang pajak daerah dapat mengatur ketentuan mengenai⁶⁶ :

1. Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya;
2. Tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa;
3. Asas timbal balik.

Terdapat 8 (delapan) Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah di Kabupaten Bogor yang disesuaikan dengan jenis pajak daerah Kabupaten/Kota, yaitu :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 62).

Obyek Pajak Hotel, adalah pelayanan yang disediakan Hotel dengan pembayaran, yaitu :

- a. fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek; dan
- b. pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, antara lain telepon, faksimili, teleks, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, taksi, dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel;

⁶⁶ Ibid Pasal 4 ayat (4) UU No. 34 Tahun 2000

- c. fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum, antara lain pusat kebugaran (fitness centre), kolam renang, tenis, golf, karaoke, dan pub, diskotik yang disediakan atau dikelola hotel;
- d. jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Yang dikecualikan dari objek pajak hotel adalah :

- a. penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel;
- b. pelayanan tinggal di asrama, dan pondok pesantren;
- c. fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran;
- d. pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum di hotel; dan
- e. pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

Subyek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel. Sedangkan wajib pajak adalah pengusaha hotel.

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh subyek pajak kepada hotel (wajib pajak). Tarif pajaknya adalah sebesar 10 % (sepuluh persen). Dengan memperhatikan kepada dasar pengenaan dan tarif tersebut, maka besarnya pokok pajak terutang

dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah, artinya bahwa pemungutan pajak dilakukan terhadap pajak terutang atas objek pajak yang terdapat di wilayah Kabupaten Bogor. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak saat pembayaran atas pelayanan hotel.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 63).

Obyek Pajak Restoran, adalah pelayanan yang disediakan Restoran dengan pembayaran, yaitu :

- a. Rumah makan atau restoran;
- b. cafe;
- c. bar; dan
- d. warung nasi.

Yang dikecualikan dari objek pajak restoran adalah :

- a. pelayanan usaha jasa boga atau catering; dan
- b. pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan, yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Untuk obyek pajak yang dikecualikan ini, sayangnya sampai sekarang belum ada peraturan daerah yang mengaturnya.

Subyek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Sedangkan wajib pajak adalah pengusaha restoran.

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh subyek pajak kepada restoran (wajib pajak). Tarif pajaknya adalah sebesar 10 % (sepuluh persen). Dengan memperhatikan kepada dasar pengenaan dan tarif tersebut, maka besarnya pokok pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah, artinya bahwa pemungutan pajak dilakukan terhadap pajak terutang atas objek pajak yang terdapat di wilayah Kabupaten Bogor. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak saat pembayaran atas pelayanan restoran.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 64).

Obyek Pajak Hiburan, adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, yaitu :

- a. Pertunjukan film;
- b. Pertunjukan kesenian dan sejenisnya;
- c. pemancingan;
- d. bilyar;

- e. pertandingan olah raga;
- f. obyek wisata;
- g. kolam renang;
- h. permainan atau ketangkasan;
- i. karaoke;
- j. rental atau penyewaan kaset video, lcd, vcd, dvd, mp3, dan sejenisnya;
- k. usaha kebugaran jasmani; dan
- l. boling dan sejenisnya.

Yang dikecualikan dari objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti :

- a. fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan hotel yang dipergunakan oleh tamu hotel; dan
- b. hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan.

Subyek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan. Sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan. Tarif pajaknya adalah ditetapkan sebagai berikut :

- a. pertunjukan film :
 - 1) Film Nasional :

Bioskop Kelas AI tarif 10 %, Bioskop Kelas All tarif 8 %, Bioskop Kelas BI tarif 6 %, dan Bioskop Kelas C tarif 5 %.

2) Film Impor :

Bioskop Kelas AI tarif 16 %, Bioskop Kelas All tarif 12 %, Bioskop Kelas BI tarif 8%, dan Bioskop Kelas C tarif 5%.

- b. pertunjukan atau hiburan lain : kesenian 10%; karaoke, ruang selera musik (*music lounge*), balai gita (*singing hall*), ruang musik (*music room*) 20%; bilyar 15%; permainan ketangkasan dan sejenisnya 10%; pertandingan olah raga 10%; objek wisata dan taman rekreasi 20%; objek wisata konservasi alam 10%; kolam renang 10%; rental atau penyewaan kaset video, LD, LCD, VCD,mp3, dan sejenisnya 10%; pemancingan 10%; usaha kebugaran jasmani 10%; boling dan sejenisnya 10%.

Dengan memperhatikan kepada dasar pengenaan dan tarif tersebut, maka besarnya pokok pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah, artinya bahwa pemungutan pajak dilakukan terhadap pajak terutang atas objek pajak yang terdapat di wilayah Kabupaten Bogor. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak saat pembayaran atas pelayanan hotel.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 65).

Obyek Pajak Reklame, adalah semua penyelenggaraan reklame, yaitu:

- a. reklame papan/billboard/videotron/megatron dan media reklame elektronik lainnya;
- b. reklame melekat (*sticker*);
- c. reklame kain;
- d. reklame selebaran;
- e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. reklame udara;
- g. reklame suara;
- h. reklame film (*slide*);
- i. reklame peragaan; dan
- j. reklame bando.

Yang dikecualikan dari objek pajak reklame adalah :

- a. penyelenggaraan reklame oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah; dan
- b. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya.

Subyek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame atau melakukan pemesanan reklame.

Sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame. Nilai sewa reklame tersebut dihitung berdasarkan nilai jual objek pajak dan nilai strategis lokasi. Nilai jual objek pajak ditetapkan dalam harga jual berdasarkan faktor-faktor biaya pemasangan, biaya pemeliharaan, jangka waktu pemasangan, jenis yang dipasang, luas, ukuran, atau jumlah. Sedangkan nilai strategis lokasi ditetapkan dalam nilai prosentase berdasarkan faktor-faktor lokasi, frekuensi lalu lintas orang dan kendaraan, dan kelas jalan. Tarif pajaknya adalah sebesar 25 % (dua puluh lima persen). Dengan memperhatikan kepada dasar pengenaan dan tarif tersebut, maka besarnya pokok pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah, artinya bahwa pemungutan pajak dilakukan terhadap pajak terutang atas objek pajak yang terdapat di wilayah Kabupaten Bogor. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sesuai dengan masa izin pemasangan reklame. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak saat penyelenggaraan atau pemasangan reklame.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 66).

Obyek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, adalah pengambilan bahan galian golongan C, yaitu : asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu (*halite*), grafit, granit atau andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, trakkit, dan tanah atau bahan urukan atau bahan baku bata dan genteng.

Yang dikecualikan dari objek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah :

- a. Kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan pemerintah daerah dan rumah tangga;
- b. Pembongkaran atau penggalian tanah dalam kegiatan pertambangan umum; dan
- c. Pemancangan tiang listrik, telepon dan penanaman kabel listrik, telepon, pipa air dan gas.

Subyek pajak Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan bahan galian golongan C. Sedangkan wajib pajak adalah orang atau badan yang melakukan pengambilan bahan galian golongan C.

Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual hasil pengambilan bahan galian golongan C. Nilai jual dihitung dengan mengalikan volume atau tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis bahan galian golongan C. Tarif pajaknya adalah sebesar 10 % (sepuluh persen). Dengan memperhatikan kepada dasar pengenaan dan tarif tersebut, maka besarnya pokok pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah, artinya bahwa pemungutan pajak dilakukan terhadap pajak terutang atas objek pajak yang terdapat di wilayah Kabupaten Bogor. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak saat pengambilan bahan galian golongan C.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 67).

Obyek Pajak Parkir, adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Yang dikecualikan dari objek pajak parkir adalah :

- a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah;
- b. Penyelenggaraan parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak negara; dan
- c. Penyelenggaraan tempat parkir dalam kegiatan sosial keagamaan.

Subyek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas penggunaan tempat parkir. Sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh subyek pajak kepada penyelenggara tempat parkir (wajib pajak). Tarif pajaknya adalah sebesar 20 % (dua puluh persen). Dengan memperhatikan kepada dasar pengenaan dan tarif tersebut, maka besarnya pokok pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah, artinya bahwa pemungutan pajak dilakukan terhadap pajak terutang atas objek pajak yang terdapat di wilayah Kabupaten Bogor. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak saat pemakaian tempat parkir.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 79).

Obyek Pajak Penerangan Jalan, adalah penggunaan tenaga listrik, yaitu penggunaan tenaga listrik baik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN.

Yang dikecualikan dari objek pajak penerangan jalan adalah :

- a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik;
- c. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait;
- d. penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah; dan
- e. penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Subyek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna

tenaga listrik, kecuali dalam hal tenaga listrik disediakan oleh PLN, maka pemungutan pajak dilakukan oleh PLN.

Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual tenaga listrik. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, maka nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian KWh yang ditetapkan dalam rekening listrik. Sedangkan tenaga listrik yang berasal bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, maka nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah Kabupaten Bogor yang ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada nilai jual tenaga listrik yang berlaku untuk PLN. Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, nilai jual tenaga listriknya ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen).

Tarif pajaknya adalah sebesar 3 % (tiga persen) untuk rumah tangga, pelayanan sosial dan bisnis, dan 9 % (sembilan persen) untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam. Dengan memperhatikan kepada dasar pengenaan dan tarif tersebut, maka besarnya pokok pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Dalam hal pajak dipungut oleh PLN, maka besarnya pokok pajak terutang dihitung berdasarkan jumlah rekening listrik yang dibayarkan oleh pelanggan PLN.

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik, artinya bahwa pemungutan pajak dilakukan terhadap pajak terutang atas objek pajak yang terdapat di wilayah Kabupaten Bogor. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 80).

Obyek Pajak Sarang Burung Walet, adalah setiap pengambilan sarang burung walet yang diperjualbelikan.

Yang dikecualikan dari objek pajak sarang burung walet adalah :

- a. Jual beli telur burung walet; dan
- b. Pengambilan sarang burung walet untuk kepentingan penelitian.

Subyek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan sarang burung walet yang disebut juga sebagai wajib pajak.

Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual sarang burung walet. Tarif pajaknya adalah sebesar 10 % (sepuluh persen). Dengan memperhatikan kepada dasar pengenaan dan tarif tersebut, maka besarnya pokok pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah, artinya bahwa pemungutan pajak dilakukan terhadap pajak terutang atas objek pajak yang terdapat di wilayah Kabupaten Bogor. Masa pajak adalah jangka

waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim atau paling lama 4 (empat) bulan takwim. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak saat pembayaran atas jual beli sarang burung gwalet.

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor untuk jenis sebagaimana disebut oleh angka 1 sampai dengan angka 7, merupakan jenis pajak daerah yang secara limitatif terdapat di dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sedangkan untuk pajak daerah sebagaimana dimaksud pada angka 8 merupakan jenis pajak daerah yang dibolehkan oleh pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor yang mengatur tentang pajak daerah, sistem pemungutan pajak daerah dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu :

1. Pemungutan berdasarkan penetapan Bupati
2. Pembayaran pajak daerah yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak

Untuk lebih jelasnya atas pemungutan tersebut digambarkan dalam penjelasan dibawah ini :

1. Berdasarkan Penetapan Bupati

Pemungutan berdasarkan penetapan Bupati merupakan salah satu alternatif dalam pemungutan pajak daerah disamping terdapat cara pemungutan lain, yaitu dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Dalam sistem

pemungutan ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor tentang Pajak Daerah ditetapkan tahapannya sebagai berikut :

1) Pendaftaran dan Pendataan.

Setiap wajib pajak dilakukan pendaftaran melalui pengisian formulir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Pendaftaran dan pendataan ini dilakukan untuk mendapatkan data Wajib Pajak baik yang berdomisili di dalam maupun diluar wilayah Daerah, yang memiliki Objek Pajak di wilayah Daerah yang bersangkutan. Setelah pendaftaran dan pendataan ini dilakukan, proses selanjutnya kepada Wajib Pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak untuk memudahkan dalam pelayanan kepada Wajib Pajak. Selanjutnya ditekankan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor tentang Pajak Daerah, bahwa setiap wajib pajak mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan harus disampaikan kepada Bupati atau Pejabat paling lama 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.

2) Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah.

Dalam pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan Kepala Daerah, setelah dilakukan pendaftaran dan pendataan kepada wajib pajak dengan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, maka pada Bab Perhitungan dan Penetapan, pada Bagian Perhitungan dan Penetapan Pajak terutang oleh Pejabat di tegaskan sebagai berikut :

“Dalam hal wajib pajak tidak memperhitungkan dan menetapkan sendiri pokok pajak terutang ... atau sampai dengan 10 (sepuluh) hari sejak berakhirnya masa pajak wajib pajak belum menyampaikan SPTPD, maka

Bupati atau pejabat menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.” Dari kutipan tersebut dapat diartikan, bahwa wajib pajak tidak memperhitungkan dan menetapkan sendiri pokok pajak terutang, berarti bahwa wajib pajak tidak mengisi SPTPD yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya dalam batasan sampai dengan 10 (sepuluh) hari sejak berakhirnya masa pajak, wajib pajak belum menyampaikan SPTPD, maka terhadap hal tersebut oleh Bupati diterbitkan SKPD sebagai dasar dalam pemungutan pajak daerah. Apabila Surat Ketetapan Pajak Daerah tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Surat Ketetapan Pajak Daerah diterima, maka kepada Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah.⁶⁷

3) Pembayaran.

Pembayaran pajak daerah harus dilakukan sekaligus atau lunas⁶⁸, namun demikian Wajib Pajak dapat melakukan penundaan pembayaran atau angsuran pembayaran setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.⁶⁹ Penundaan pembayaran dapat diberikan persetujuan kepada

⁶⁷ Ibid Pasal 13 ayat (2) Perda. No. 15 Tahun 2002, Pasal 13 ayat (2) Perda No.16 Tahun 2002, Pasal 13 ayat (2) Perda No. 17 Tahun 2002, Pasal 16 ayat (2) Perda No. 18 Tahun 2002, Pasal 13 ayat (2) Perda No. 19 Tahun 2002, Pasal 13 ayat (2) Perda No. 20 Tahun 2002, Pasal 14 ayat (2) Perda No.23 Tahun 2002, Pasal 13 ayat (2) Perda No. 24 Tahun 2002.

⁶⁸ Ibid Pasal 16 ayat (1) Perda No. 15 Tahun 2002, Pasal 16 ayat (1) Perda No. 16 Tahun 2002, Pasal 16 ayat (1) Perda No. 17 Tahun 2002, Pasal 19 ayat (1) Perda No. 18 Tahun 2002, Pasal 16 ayat (1) Perda No. 19 Tahun 2002, Pasal 16 ayat (1) Perda No. 20 Tahun 2002, Pasal 17 ayat (1) Perda No. 23 Tahun 2002, Pasal 16 ayat (1) Perda No. 24 Tahun 2002.

⁶⁹ Ibid Pasal 16 ayat (2) dan ayat (4) Perda No. 15 Tahun 2002, Pasal 16 ayat (2) dan ayat (4) Perda No. 16 Tahun 2002, Pasal 16 ayat (2) dan ayat (4) Perda No. 17 Tahun 2002, Pasal 19 ayat (2) dan ayat (4) Perda No. 18 Tahun 2002, Pasal 16 ayat (2) dan ayat (4) Perda No. 19 Tahun 2002, Pasal 16 ayat (2) dan ayat (4) Perda No. 20 Tahun 2002, Pasal 17 ayat (2) dan ayat (4) Perda No. 23 Tahun 2002, Pasal 16 ayat (2) dan ayat (4) Perda No. 24 Tahun 2002.

Wajib Pajak sampai pada batas waktu tertentu dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.⁷⁰ Sedangkan angsuran pembayaran pajak harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.⁷¹

4) Penagihan Pajak.

Penagihan pajak daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan pajak daerah, yang diawali dengan penyampaian Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis sampai dengan penyampaian Surat Paksa kepada Wajib Pajak agar wajib pajak yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan pajak yang terutang. Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis tersebut oleh Bupati atau Pejabat (pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku) dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran dan kepada Wajib Pajak harus melunasi pajak terutang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis tersebut.⁷² Apabila pajak

⁷⁰ Ibid Pasal 16 ayat (4) Perda No. 15 Tahun 2002, Pasal 16 ayat (4) Perda No. 16 Tahun 2002, Pasal 16 ayat (4) Perda No. 17 Tahun 2002, Pasal 19 ayat (4) Perda No. 18 Tahun 2002, Pasal 16 ayat (4) Perda No. 19 Tahun 2002, Pasal 16 ayat (4) Perda No. 20 Tahun 2002, Pasal 17 ayat (4) Perda No. 23 Tahun 2002, Pasal 16 ayat (4) Perda No. 24 Tahun 2002.

⁷¹ Ibid Pasal 16 ayat (3) Perda No. 15 Tahun 2002, Pasal 16 ayat (3) Perda No. 16 Tahun 2002, Pasal 16 ayat (3) Perda No. 17 Tahun 2002, Pasal 19 ayat (3) Perda No. 18 Tahun 2002, Pasal 16 ayat (3) Perda No. 19 Tahun 2002, Pasal 16 ayat (3) Perda No. 20 Tahun 2002, Pasal 17 ayat (3) Perda No. 23 Tahun 2002, Pasal 16 ayat (3) Perda No. 24 Tahun 2002.

⁷² Ibid Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Perda No. 15 Tahun 2002, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Perda No. 16 Tahun 2002, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Perda No. 17 Tahun 2002, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Perda No. 18 Tahun 2002, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Perda No. 19 Tahun 2002, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Perda No. 20 Tahun 2002, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Perda No. 23 Tahun 2002, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Perda No. 24 Tahun 2002.

terutang tidak juga dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut, maka pajak terutang ditagih dengan mengeluarkan Surat Paksa setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.⁷³ Dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa pajak terutang tidak dibayar, Pejabat diberikan kewenangan untuk menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.⁷⁴ Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan pajak terutang tidak dibayar oleh Wajib Pajak, maka Pejabat mengajukan permintaan kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara untuk menetapkan tanggal pelelangan.⁷⁵ Setelah ditetapkan tanggal pelelangan, Juru sita memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.⁷⁶

5) Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah mengatur, bahwa Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak. Bagaimana tata cara

⁷³ Ibid Pasal 18 ayat (2) Perda No. 15 Tahun 2002, Pasal 18 ayat (2) Perda No. 16 Tahun 2002, Pasal 18 ayat (2) Perda No. 17 Tahun 2002, Pasal 21 ayat (2) Perda No. 18 Tahun 2002, Pasal 18 ayat (2) Perda No. 19 Tahun 2002, Pasal 18 ayat (2) Perda No. 20 Tahun 2002, Pasal 19 ayat (2) Perda No. 23 Tahun 2002, Pasal 18 ayat (2) Perda No. 24 Tahun 2002.

⁷⁴ Ibid Pasal 19 Perda No. 15 Tahun 2002, Pasal 19 Perda No. 16 Tahun 2002, Pasal 19 Perda No. 17 Tahun 2002, Pasal 22 Perda No. 18 Tahun 2002, Pasal 19 Perda No. 19 Tahun 2002, Pasal 19 Perda No. 20 Tahun 2002, Pasal 20 Perda No. 23 Tahun 2002, Pasal 19 Perda No. 24 Tahun 2002.

⁷⁵ Ibid Pasal 20 Perda No. 15 Tahun 2002, Pasal 20 Perda No. 16 Tahun 2002, Pasal 20 Perda No. 17 Tahun 2002, Pasal 23 Perda No. 18 Tahun 2002, Pasal 20 Perda No. 19 Tahun 2002, Pasal 20 Perda No. 20 Tahun 2002, Pasal 17 ayat (2) dan ayat (4) Perda No. 23 Tahun 2002, Pasal 16 ayat (2) dan ayat (4) Perda No. 24 Tahun 2002.

⁷⁶ Ibid Pasal 21 Perda No. 15 Tahun 2002, Pasal 21 Perda No. 16 Tahun 2002, Pasal 21 Perda No. 17 Tahun 2002, Pasal 24 Perda No. 18 Tahun 2002, Pasal 21 Perda No. 19 Tahun 2002, Pasal 21 Perda No. 20 Tahun 2002, Pasal 22 Perda No. 23 Tahun 2002, Pasal 21 Perda No. 24 Tahun 2002.

pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak tersebut ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

6) Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi.

Pembetulan Surat Ketetapan Pajak Daerah dapat dilakukan oleh Kepala Daerah apabila yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Ketetapan pajak yang tidak benar dapat pula dibatalkan atau dikurangkan oleh Kepala Daerah. Demikian pula berkaitan dengan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya, Kepala Daerah diberikan kewenangan untuk mengurangi atau menghapuskan.

Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Daerah ini merupakan kewenangan Kepala Daerah atau Pejabat setelah adanya pelaksanaan hak dari Wajib Pajak, yaitu hak untuk dapat dilakukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Daerah.

Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Daerah, oleh Wajib Pajak permohonan harus disampaikan secara

tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Surat Ketetapan Pajak Daerah, dengan memberikan alasan yang jelas.⁷⁷

Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan dari Wajib Pajak, Kepala Daerah atau Pejabat sudah harus memberikan keputusan. Apabila tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.⁷⁸

7) Keberatan dan Banding.

Wajib Pajak diberikan hak oleh Pasal 20 ayat (1) huruf a untuk mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau pejabat atas Surat Ketetapan Pajak Daerah. Dalam mengajukan keberatan tersebut oleh ayat (2)-nya dipersyaratkan adanya alasan yang jelas atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah. Alasan tidak perlu disampaikan oleh Wajib Pajak, apabila dapat menunjukkan bukti bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. Ini berarti, bahwa keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah hanya dilakukan berkaitan dengan masa pembayaran pajak, bukan berkaitan dengan besarnya pajak terutang sebagaimana

⁷⁷ Ibid Pasal 23 ayat (2) Perda No. 15 Tahun 2002, Pasal 23 ayat (2) Perda No. 16 Tahun 2002, Pasal 23 ayat (2) Perda No. 17 Tahun 2002, Pasal 26 ayat (2) Perda No. 18 Tahun 2002, Pasal 23 ayat (2) Perda No. 19 Tahun 2002, Pasal 23 ayat (2) Perda No. 20 Tahun 2002, Pasal 24 ayat (2) Perda No. 23 Tahun 2002, Pasal 23 ayat (2) Perda No. 24 Tahun 2002.

⁷⁸ Ibid Pasal 23 ayat (3) Perda No. 15 Tahun 2002, Pasal 23 ayat (3) Perda No. 16 Tahun 2002, Pasal 23 ayat (3) Perda No. 17 Tahun 2002, Pasal 26 ayat (3) Perda No. 18 Tahun 2002, Pasal 23 ayat (3) Perda No. 19 Tahun 2002, Pasal 23 ayat (3) Perda No. 20 Tahun 2002, Pasal 24 ayat (3) Perda No. 23 Tahun 2002, Pasal 23 ayat (3) Perda No. 24 Tahun 2002.

tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah. Namun berdasarkan ayat (5), pengajuan keberatan tersebut tidak menunda dalam membayar pajak. Hal ini berarti, bahwa keberatan berkaitan dengan besaran pajak terutang sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, bukan mengenai masa pembayaran pajak.

Batas waktu yang diberikan kepada Kepala Daerah atau Pejabat untuk memberikan keputusan atas permohonan keberatan dari Wajib Pajak adalah maksimal 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima. Apabila lewat dari waktu yang telah ditentukan tersebut, maka permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

Apabila permohonannya ditolak, Wajib Pajak diberikan hak untuk mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (sekarang Pengadilan Pajak), dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.

Pengajuan keberatan dan banding tersebut dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

2. Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak

Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa dalam pemungutan pajak daerah dikenal adanya pemungutan berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

Dalam sistem pemungutan dimana Wajib Pajak membayar sendiri adalah pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah. Dalam sistem pemungutan jenis ini yang aktif adalah Wajib Pajak, sedangkan Fiskus (pihak Pemerintah Daerah) bersifat pasif. Pada setiap masa pajak, Wajib Pajak diberikan kewajiban untuk melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah. Apabila Wajib Pajak yang diberikan kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang tidak memenuhi kewajibannya, oleh Kepala Daerah dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang menjadi sarana penagihan.

Dalam sistem pemungutan ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor tentang Pajak Daerah ditetapkan tahapannya sebagai berikut :

1) Pendaftaran dan Pendataan.

Pendaftaran dan pendataan,⁷⁹ adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data dan atau informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas pajak dengan cara penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak untuk diisi secara lengkap dan benar. Pendaftaran dan pendataan ini dilakukan untuk mendapatkan data Wajib

⁷⁹ Lihat Kepmendagri No. 170 Tahun 1997 Pasal 1 huruf f.

Pajak baik yang berdomisili di dalam maupun diluar wilayah Daerah, yang memiliki Objek Pajak di wilayah Daerah yang bersangkutan. Setelah pendaftaran dan pendataan ini dilakukan, proses selanjutnya kepada Wajib Pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak untuk memudahkan dalam pelayanan kepada Wajib Pajak.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah harus disampaikan kepada Bupati atau pejabat paling lama 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Selanjutnya apabila wajib pajak tidak atau kurang membayar pokok pajak terutang dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah.⁸⁰

2) Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah.

Dalam pemungutan pajak daerah dimana Wajib Pajak membayar sendiri, setelah dilakukan pendaftaran dan pendataan kepada wajib pajak dan wajib pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, maka dengan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tersebut Wajib Pajak melakukan

⁸⁰ Lihat Pasal 12 ayat (2) Perda No. 15 Tahun 2002, Pasal 12 ayat (2) Perda No. 16 Tahun 2002, Pasal 12 ayat (2) Perda No.17 Tahun 2002, Pasal 15 ayat (2) Perda No.18 Tahun 2002, Pasal 12 ayat (2) Perda No.19 Tahun 2002, Pasal 12 ayat (2) Perda 20 Tahun 2002, Pasal 13 ayat (2) Perda No. 23 Tahun 2002, Pasal 12 ayat (2) Perda Nomor 24 Tahun 2002.

penghitungan dan menetapkan sendiri pajak terutang. Dalam sistem pemungutan jenis ini, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah diberikan hak untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan.⁸¹ Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar diterbitkan dalam hal sebagai berikut⁸² :

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
- b. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
- c. Kewajiban mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen)

⁸¹ Ibid Pasal 14 ayat (1) Perda No. 15 Tahun 2002, Pasal 14 ayat (1) Perda No. 16 Tahun 2002, Pasal 14 ayat (1) Perda No.17 Tahun 2002, Pasal 17 ayat (1) Perda No.18 Tahun 2002, Pasal 14 ayat (1) Perda No.19 Tahun 2002, Pasal 14 ayat (1) Perda 20 Tahun 2002, Pasal 15 ayat (1) Perda No. 23 Tahun 2002, Pasal 14 ayat (1) Perda Nomor 24 Tahun 2002.

⁸² Ibid Pasal 14 ayat (2) Perda No. 15 Tahun 2002, Pasal 14 ayat (2) Perda No. 16 Tahun 2002, Pasal 14 ayat (2) Perda No.17 Tahun 2002, Pasal 17 ayat (2) Perda No.18 Tahun 2002, Pasal 14 ayat (2) Perda No.19 Tahun 2002, Pasal 14 ayat (2) Perda 20 Tahun 2002, Pasal 15 ayat (2) Perda No. 23 Tahun 2002, Pasal 14 ayat (2) Perda Nomor 24 Tahun 2002.

dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Sedangkan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan dilakukan, apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

Dalam hal pajak terutang sebagaimana yang tercantum didalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Kepala Daerah diberikan kewenangan untuk menagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.

3) Pembayaran.

Pembayaran pajak daerah harus dilakukan sekaligus atau lunas⁸³, namun demikian Wajib Pajak dapat melakukan penundaan pembayaran atau angsuran pembayaran setelah memenuhi persyaratan yang

⁸³ Ibid Pasal 16 ayat (1) Perda No. 15 Tahun 2002, Pasal 16 ayat (1) Perda No. 16 Tahun 2002, Pasal 16 ayat (1) Perda No. 17 Tahun 2002, Pasal 19 ayat (1) Perda No. 18 Tahun 2002, Pasal 16 ayat (1) Perda No. 19 Tahun 2002, Pasal 16 ayat (1) Perda No. 20 Tahun 2002, Pasal 17 ayat (1) Perda No. 23 Tahun 2002, Pasal 16 ayat (1) Perda No. 24 Tahun 2002.

ditetapkan oleh Kepala Daerah.⁸⁴ Penundaan pembayaran dapat diberikan persetujuan kepada Wajib Pajak sampai pada batas waktu tertentu dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.⁸⁵ Sedangkan angsuran pembayaran pajak harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.⁸⁶

4) Penagihan Pajak.

Penagihan pajak daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan pajak daerah, yang diawali dengan penyampaian Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis sampai dengan penyampaian Surat Paksa kepada Wajib Pajak agar wajib pajak yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan pajak yang terutang. Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis tersebut oleh Pejabat (pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku) dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran dan kepada Wajib Pajak harus melunasi pajak terutang dalam jangka waktu 7

⁸⁴ Ibid Pasal 16 ayat (2) dan ayat (4) Perda No. 15 Tahun 2002, Pasal 16 ayat (2) dan ayat (4) Perda No. 16 Tahun 2002, Pasal 16 ayat (2) dan ayat (4) Perda No. 17 Tahun 2002, Pasal 19 ayat (2) dan ayat (4) Perda No. 18 Tahun 2002, Pasal 16 ayat (2) dan ayat (4) Perda No. 19 Tahun 2002, Pasal 16 ayat (2) dan ayat (4) Perda No. 20 Tahun 2002, Pasal 17 ayat (2) dan ayat (4) Perda No. 23 Tahun 2002, Pasal 16 ayat (2) dan ayat (4) Perda No. 24 Tahun 2002.

⁸⁵ Ibid Pasal 16 ayat (4) Perda No. 15 Tahun 2002, Pasal 16 ayat (4) Perda No. 16 Tahun 2002, Pasal 16 ayat (4) Perda No. 17 Tahun 2002, Pasal 19 ayat (4) Perda No. 18 Tahun 2002, Pasal 16 ayat (4) Perda No. 19 Tahun 2002, Pasal 16 ayat (4) Perda No. 20 Tahun 2002, Pasal 17 ayat (4) Perda No. 23 Tahun 2002, Pasal 16 ayat (4) Perda No. 24 Tahun 2002.

⁸⁶ Ibid Pasal 16 ayat (3) Perda No. 15 Tahun 2002, Pasal 16 ayat (3) Perda No. 16 Tahun 2002, Pasal 16 ayat (3) Perda No. 17 Tahun 2002, Pasal 19 ayat (3) Perda No. 18 Tahun 2002, Pasal 16 ayat (3) Perda No. 19 Tahun 2002, Pasal 16 ayat (3) Perda No. 20 Tahun 2002, Pasal 17 ayat (3) Perda No. 23 Tahun 2002, Pasal 16 ayat (3) Perda No. 24 Tahun 2002.

(tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis tersebut.⁸⁷ Apabila pajak terutang tidak juga dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut, maka pajak terutang ditagih dengan mengeluarkan Surat Paksa setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.⁸⁸ Dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa pajak terutang tidak dibayar, Pejabat diberikan kewenangan untuk menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.⁸⁹ Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan pajak terutang tidak dibayar oleh Wajib Pajak, maka Pejabat mengajukan permintaan kepada Kantor Lelang Negara untuk menetapkan tanggal pelelangan.⁹⁰ Setelah ditetapkan tanggal pelelangan, Juru sita memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.⁹¹

⁸⁷ Ibid Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Perda No. 15 Tahun 2002, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Perda No. 16 Tahun 2002, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Perda No. 17 Tahun 2002, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Perda No. 18 Tahun 2002, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Perda No. 19 Tahun 2002, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Perda No. 20 Tahun 2002, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Perda No. 23 Tahun 2002, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Perda No. 24 Tahun 2002.

⁸⁸ Ibid Pasal 18 ayat (2) Perda No. 15 Tahun 2002, Pasal 18 ayat (2) Perda No. 16 Tahun 2002, Pasal 18 ayat (2) Perda No. 17 Tahun 2002, Pasal 21 ayat (2) Perda No. 18 Tahun 2002, Pasal 18 ayat (2) Perda No. 19 Tahun 2002, Pasal 18 ayat (2) Perda No. 20 Tahun 2002, Pasal 19 ayat (2) Perda No. 23 Tahun 2002, Pasal 18 ayat (2) Perda No. 24 Tahun 2002.

⁸⁹ Ibid Pasal 19 Perda No. 15 Tahun 2002, Pasal 19 Perda No. 16 Tahun 2002, Pasal 19 Perda No. 17 Tahun 2002, Pasal 22 Perda No. 18 Tahun 2002, Pasal 19 Perda No. 19 Tahun 2002, Pasal 19 Perda No. 20 Tahun 2002, Pasal 20 Perda No. 23 Tahun 2002, Pasal 19 Perda No. 24 Tahun 2002.

⁹⁰ Ibid Pasal 20 Perda No. 15 Tahun 2002, Pasal 20 Perda No. 16 Tahun 2002, Pasal 20 Perda No. 17 Tahun 2002, Pasal 23 Perda No. 18 Tahun 2002, Pasal 20 Perda No. 19 Tahun 2002, Pasal 20 Perda No. 20 Tahun 2002, Pasal 17 ayat (2) dan ayat (4) Perda No. 23 Tahun 2002, Pasal 16 ayat (2) dan ayat (4) Perda No. 24 Tahun 2002.

⁹¹ Ibid Pasal 21 Perda No. 15 Tahun 2002, Pasal 21 Perda No. 16 Tahun 2002, Pasal 21 Perda No. 17 Tahun 2002, Pasal 24 Perda No. 18 Tahun 2002, Pasal 21 Perda No. 19 Tahun 2002, Pasal 21 Perda No. 20 Tahun 2002, Pasal 22 Perda No. 23 Tahun 2002, Pasal 21 Perda No. 24 Tahun 2002.

5) Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah mengatur, bahwa Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak. Bagaimana tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak tersebut ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

6) Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi.

Pembetulan Surat Ketetapan Pajak Daerah dapat dilakukan oleh Kepala Daerah apabila yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Ketetapan pajak yang tidak benar dapat pula dibatalkan atau dikurangkan oleh Kepala Daerah. Demikian pula berkaitan dengan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya, Kepala Daerah diberikan kewenangan untuk mengurangi atau menghapuskan.

Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Daerah ini merupakan kewenangan Kepala Daerah atau Pejabat setelah adanya pelaksanaan hak dari Wajib Pajak, yaitu hak untuk dapat dilakukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan

penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Daerah.

Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Daerah, oleh Wajib Pajak permohonan harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Surat Ketetapan Pajak Daerah, dengan memberikan alasan yang jelas.⁹²

Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan dari Wajib Pajak, Kepala Daerah atau Pejabat sudah harus memberikan keputusan. Apabila tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.⁹³

7) Keberatan dan Banding.

Wajib Pajak diberikan hak oleh Pasal 20 ayat (1) huruf a untuk mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau pejabat atas Surat Ketetapan Pajak Daerah. Dalam mengajukan keberatan tersebut oleh ayat (2)-nya dipersyaratkan adanya alasan yang jelas atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah. Alasan tidak perlu disampaikan oleh Wajib

⁹² Ibid Pasal 23 ayat (2) Perda No. 15 Tahun 2002, Pasal 23 ayat (2) Perda No. 16 Tahun 2002, Pasal 23 ayat (2) Perda No. 17 Tahun 2002, Pasal 26 ayat (2) Perda No. 18 Tahun 2002, Pasal 23 ayat (2) Perda No. 19 Tahun 2002, Pasal 23 ayat (2) Perda No. 20 Tahun 2002, Pasal 24 ayat (2) Perda No. 23 Tahun 2002, Pasal 23 ayat (2) Perda No. 24 Tahun 2002.

⁹³ Ibid Pasal 23 ayat (3) Perda No. 15 Tahun 2002, Pasal 23 ayat (3) Perda No. 16 Tahun 2002, Pasal 23 ayat (3) Perda No. 17 Tahun 2002, Pasal 26 ayat (3) Perda No. 18 Tahun 2002, Pasal 23 ayat (3) Perda No. 19 Tahun 2002, Pasal 23 ayat (3) Perda No. 20 Tahun 2002, Pasal 24 ayat (3) Perda No. 23 Tahun 2002, Pasal 23 ayat (3) Perda No. 24 Tahun 2002.

Pajak, apabila dapat menunjukkan bukti bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaanya. Ini berarti, bahwa keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah hanya dilakukan berkaitan dengan masa pembayaran pajak, bukan berkaitan dengan besarnya pajak terutang sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah. Namun berdasarkan ayat (5), pengajuan keberatan tersebut tidak menunda dalam membayar pajak. Hal ini berarti, bahwa keberatan berkaitan dengan besaran pajak terutang sebagaimana yang tertuang didalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, bukan mengenai masa pembayaran pajak.

Batas waktu yang diberikan kepada Kepala Daerah atau Pejabat untuk memberikan keputusan atas permohonan keberatan dari Wajib Pajak adalah maksimal 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima. Apabila lewat dari waktu yang telah ditentukan tersebut, maka permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

Apabila permohonannya ditolak, Wajib Pajak diberikan hak untuk mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (sekarang Pengadilan Pajak), dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.

Pengajuan keberatan dan banding tersebut dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pelaksanaan sistem pemungutan pajak daerah di Kabupaten Bogor selain berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dikenal sebagai cara *official assessment system* juga dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak atau dikenal sebagai cara *self assessment system*. Namun dalam sistem pemungutan pajak yang terdapat dalam perpajakan di Indonesia, masih terdapat satu sistem lagi sistem pemungutan pajak yakni *with holding system*. Mekanisme dalam *with holding system* menyatakan bahwa sistem pemungutan pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh pejabat. Sehingga fiskus maupun wajib pajak bersifat pasif. Pihak ketiga melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian juga di Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor yang pada pelaksanaan mekanisme pemungutan sebenarnya menggunakan *with holding system*, seperti pajak penerangan jalan, yakni pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai penyelenggara pengadaan listrik bertindak sebagai pihak ketiga yang melakukan pemotongan/ pemungutan pajak. Dalam hal ini terdapat kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dengan PLN, khusus untuk Pajak Penerangan Jalan yang bersumber dari PLN. Saat ini Wilayah Daerah Kabupaten Bogor di layani oleh 1 (satu) Distribusi Jakarta dan Tangerang, dan 2 (dua) Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) PT. PLN, yaitu APJ Depok dan APJ Bogor.

B.3. Konsistensi antara peraturan daerah yang mengatur pajak daerah dengan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah

Menurut Mansury dalam bukunya *Panduan Konsep Umum Pajak Penghasilan Indonesia* mengemukakan bahwa dalam sistem perpajakan terdapat 3 (tiga) unsur pokok, yakni : Kebijakan Perpajakan (*Tax Policy*), Undang-undang Perpajakan (*Tax Laws*), Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*)⁹⁴

Unsur-unsur tersebut saling terkait antara satu dengan yang lain dan terjadi proses sesuai dengan urutan sebagai kebijaksanaan pemerintah. Sehingga sebagai sebuah kebijaksanaan pemerintah, sistem perpajakan merupakan sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang ditetapkan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, antara lain meliputi : pajak yang akan dipungut, siapa yang akan dijadikan subjek pajak, apa saja yang merupakan objek pajak, berapa besar tarif pajak, bagaimana prosedurnya.

Apabila ditetapkan dalam bentuk undang-undang, kebijaksanaan perpajakan akan dikelompokkan dalam hukum pajak materiil dan hukum pajak formil yang keduanya saling berkaitan. Hukum pajak materiil memuat tentang segala sesuatu tentang timbulnya, besar dan hapusnya hutang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak, sedangkan hukum pajak formil memuat tata cara penyelenggaraan

⁹⁴ Mansury, *Panduan Konsep Umum Pajak Penghasilan Indonesia*, Bina Pena Pariwara, Jakarta, 1994, hal 37

penetapan suatu hutang pajak, pengawasan pemerintah terhadap penyelenggaraannya, kewajiban pihak ketiga dan prosedurnya.

Prosedur pelaksanaannya meliputi administrasi pajak, tata cara pemungutan yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban wajib pajak maupun aparat pajak.

Peraturan-peraturan dapat dianalisis menggunakan 3 (tiga) elemen yaitu :

1. Pembenaran (*Warrant*)

Merupakan suatu asumsi di dalam kebijakan yang memungkinkan analisis untuk berpindah dari informasi yang relevan dengan kebijakan ke klaim. Kebijakan pembenaran dapat mengandung berbagai asumsi otoritatif, analisenetris, kausal, pragmatis dan kritik nilai, peranan dan pembenaran adalah untuk membawa informasi yang relevan dengan kebijakan/ kepada klaim kebijakan tentang terjadinya ketidaksepakatan atau konflik dengan demikian memberi suatu alasan untuk menerima klaim.

2. Dukungan (*Backing*)

Dukungan bagi pembenaran terdiri dari asumsi-asumsi tambahan atau argumen yang dapat digunakan untuk mendukung pembenaran yang tidak diterima pada nilai yang tampak dukungan terhadap pembenaran dapat mengambil berbagai macam bentuk yaitu hukum-hukum ilmiah dengan pertimbangan.

3. Bantahan (*Rebutal*)

Bantahan merupakan kesimpulan-kesimpulan yang kedua asumsi atau argumen yang menyatakan kondisi dimana klaim dapat diterima pada derajat penerimaan tertentu secara keseluruhan klaim kebijakan yaitu kebijakan ketidaksepakatan di antara segmen-segmen yang berbeda dalam masyarakat terhadap serangkaian alternatif tindakan pemerintah. Pertimbangan terhadap bantahan-bantahan membantu analisis sistematis untuk mengkritik salah satu klaim asumsi dan argumennya.⁹⁵

Ketiga konsep tersebut dapat digunakan untuk menganalisis peraturan-peraturan tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pembenaran sebagai kekuatan untuk berperannya suatu perundang-undangan dengan mengkaji ulang dan mengamati substansial Undang-undang secara keilmuan dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan, ketertiban umum dan susila sehingga suatu peraturan itu dapat dibenarkan. Dukungan yang diberikan kepada suatu peraturan untuk menjamin berlakunya suatu peraturan dapat diterima oleh masyarakat, sedangkan bantahan akan diungkapkan melalui pengamatan dan penelitian terhadap kinerja peraturan perundang-undangan serta permasalahan yang timbul di dalam masyarakat setelah peraturan perundang-undangan diberlakukan.⁹⁶

⁹⁵ William N. Dunn, *Analisa Kebijaksanaan Publik*, PT. Gramedia, Jakarta, 1990, hal 104.

⁹⁶ Mansury, *Op.Cit.*164

Apabila dikaitkan dengan konsistensi antara peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah terdapat hal yang kurang konsisten. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam Pasal 25A menyebutkan bahwa pengawasan Peraturan Daerah Pajak daerah dan Retribusi Daerah pembatalan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sekarang ini pengawasan dilakukan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Pasal 189 bahwa :

Proses penetapan rancangan Perda yang berkaitan dengan pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah menjadi Perda, berlaku Pasal 185 dan Pasal 186, dengan ketentuan untuk pajak daerah dan retribusi daerah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menteri Keuangan, dan untuk tata ruang daerah dikoordinasikan dengan menteri yang membidangi urusan tata ruang dalam dimana untuk Perda propinsi menjadi kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk membatalkannya sedangkan perda kabupaten/kota pembatalannya dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi.

2. Kemudian dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga disebutkan bahwa :
 - (1) Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.
 - (2) Pemerintahan daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan undang-undang.
 - (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf a angka 3 dan lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf a angka 4

ditetapkan dengan Perda berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Ketentuan tersebut diatas sangat berbeda dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain menyebutkan bahwa dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis pajak kabupaten/ kota selain yang ditetapkan dalam undang-undang.

3. Mengenai Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah/ Air Permukaan dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah berubah menjadi pajak provinsi. Apabila dilihat berdasarkan kriteria pajak yang ditetapkan dalam Pasal 4 undang-undang tersebut bahwa air bawah tanah lebih tepat menjadi pajak daerah kabupaten/kota karena objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/ kota yang bersangkutan.
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa pajak dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah *atau* dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Berkaitan dengan pemungutan yang didasarkan kepada penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib

Pajak tersebut, oleh penjelasan undang-undang tersebut diterangkan, bahwa ayat ini mengatur tata cara pengenaan pajak, yaitu ditetapkan oleh Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Cara pertama, pajak dibayar oleh Wajib Pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan (berupa karcis atau nota perhitungan). Cara kedua, pajak dibayar sendiri adalah pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain mengatur berbeda mengenai pemungutan pajak daerah sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dimana dalam pemungutan pajak daerah dengan penetapan Kepala Daerah maupun Wajib Pajak membayar sendiri, keduanya menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah sebagai dokumen dalam pendaftaran Wajib Pajak.
6. Berdasarkan 8 (delapan) peraturan daerah Kabupaten Bogor mengenai pajak daerah materi tentang tata cara pemungutan pada

dasarnya adalah sama. Kesamaan materi tersebut meliputi, tata cara pendaftaran dan pendataan; perhitungan dan penetapan yang dibedakan ke dalam perhitungan dan penetapan sendiri pajak terutang oleh Wajib Pajak disatu sisi dan perhitungan dan penetapan pajak terutang oleh Bupati disisi lain.

Penggunaan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah pada saat pendaftaran dan pendataan dalam pemungutan dengan penetapan Bupati, adalah tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Pajak Daerah, karena Surat Pemberitahuan Pajak Daerah merupakan sarana yang digunakan, apabila Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak sendiri. Apabila dalam pendaftaran dan pendataan diperlukan suatu formulir pendaftaran dan pendataan, tidak tepat apabila menggunakan istilah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah. Karena berdasarkan pengertiannya,⁹⁷ Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah digunakan sebagai dasar dalam menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah.

⁹⁷ Lihat Pasal 1 angka 10 Perda. No. 15 Tahun 2002, Pasal 1 angka 10 Perda No.16 Tahun 2002, Pasal 1 angka 12 Perda No. 17 Tahun 2002, Pasal 1 angka 10 Perda No. 18 Tahun 2002, Pasal 1 angka 10 Perda No. 19 Tahun 2002, Pasal 1 angka 10 Perda No. 20 Tahun 2002, Pasal 1 angka 11 Perda No.23 Tahun 2002, Pasal 1 angka 11 Perda No. 24 Tahun 2002.

7. Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah di dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2008. Pelaksanaan pemungutan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah, Dinas Pendapatan Kabupaten Bogor menugaskan pegawai untuk melakukan pendaftaran dan pendataan untuk semua jenis pajak daerah. Demikian pula dalam penagihan juga dilakukan oleh Pegawai yang ditunjuk khusus untuk itu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat ketentuan dalam pasal-pasal yang kurang konsisten antara satu peraturan dengan peraturan yang lain. Hal ini berakibat pada pembuatan peraturan daerah maupun kebijakan teknisnya yang diterapkan di daerah menjadi berbeda dengan peraturan induknya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan penelitian dan analisa Sistem Pemungutan Pajak Daerah dalam Era Otonomi Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Bogor) sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab I sampai Bab III sebelumnya, maka dalam Bab Penutup ini disimpulkan sebagai berikut :

1. Setiap jenis pajak daerah yang diberlakukan di Indonesia harus mempunyai dasar hukum yang kuat untuk menjamin kelancaran pengenaan dan pemungutannya. Sesuai dengan amanat Pasal 23A UUD Negara RI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa segala pajak untuk kegunaan kas Negara berdasarkan undang-undang sehingga tidak mungkin Negara memungut pajak dari rakyat tanpa adanya undang-undang. Dasar hukum sistem pemungutan pajak daerah dalam era otonomi daerah antara lain :
 - a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 - b. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
 - c. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
- e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain.
- f. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah berdasarkan pada Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah. Terdapat 8 (delapan) jenis Peraturan Daerah di Kabupaten Bogor yang mengatur mengenai pajak daerah, terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir. Namun demikian dengan Peraturan Daerah dapat dibentuk pajak daerah selain tersebut diatas setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh undang-undang.
- g. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah sebagai penjabaran Peraturan Pemerintah nomor 65 Tahun 2002 tentang Pajak Daerah dan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.

2. Sistem pemungutan pajak daerah yang kewenangan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Bogor dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. Peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah tersebut, mengatur pemungutan pajak daerah dapat digunakan sistem pemungutan berdasarkan penetapan Kepala Daerah (Bupati) atau Wajib Pajak membayar sendiri. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah sudah mengelompokkan berdasarkan jenis pajak yang ada di Kabupaten Bogor.

a. Pajak Daerah yang pemungutannya berdasarkan penetapan Bupati, yakni : Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Non PLN dan Pajak Sarang Burung Walet.

b. Pajak Daerah yang pemungutan wajib pajak membayar sendiri, yakni : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.

Khusus untuk Pajak Penerangan Jalan yang bersumber dari PLN, pemungutan dilakukan kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dengan PT. PLN. Dalam pemungutan pajak daerah, sebagai awal pelaksanaan pemungutan dilakukan pendaftaran dan

pendataan dengan menggunakan media Surat Pemberitahuan Pajak Daerah. Setelahnya itu, bagi wajib pajak yang membayar sendiri Surat Pemberitahuan Pajak Daerah digunakan sebagai sarana dalam penyetoran pajak terutang. Sedangkan untuk pemungutan yang didasarkan pada penetapan Kepala Daerah/Bupati, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah digunakan sebagai dasar dalam menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah.

3. Apabila diperhatikan antara peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah terdapat hal yang kurang konsisten. Tidak konsistennya antara Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 maupun Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Aturan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor mengenai Pajak Daerah maupun Peraturan Daerah Kabupaten Bogor yang mengatur mengenai Pajak Daerah, Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah di dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2008 berbeda dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

B. Saran

Sejalan dengan hasil uraian pembahasan dan kesimpulan sebagaimana digambarkan di atas, maka penulis dapat menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Dalam meningkatkan pemahaman wajib pajak daerah maupun masyarakat terhadap aturan-aturan pelaksana pemungutan pajak daerah, hendaknya dilakukan sosialisasi atas aturan-aturan pendukung pemungutan pajak daerah secara berkesinambungan dengan metode dan bentuk sosialisasi yang tepat, sehingga menciptakan pemahaman yang utuh atas substansi dari ketentuan-ketentuan yang telah dirumuskan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor mengenai pajak daerah perlu menegaskan sistem pemungutannya pada setiap jenis pajak daerah. Pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dengan menugaskan pegawai untuk melakukan pendaftaran dan pendataan langsung terhadap obyek pajak daerah diluar prosedur administrasi pemungutan pajak daerah, kurang tepat karena akan menimbulkan kerawanan terhadap besarnya pajak terutang.
3. Perlunya merevisi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disesuaikan dengan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Antara lain berkaitan dengan :

- a. Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan secara limitatif oleh Undang-undang agar daerah tidak terlalu kreatif dalam membentuk pajak atau retribusi daerah, yang pada akhirnya akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- b. Dikecualikan untuk potensi daerah-daerah tertentu yang mempunyai nilai ekonomis cukup tinggi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, dapat dijadikan pajak daerah tetapi dengan parameter yang jelas serta persyaratan yang ketat..
- c. Tarif pajak dan retribusi dipertimbangkan kembali agar tidak menimbulkan biaya tinggi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. Di samping itu meningkatkan tarif pajak dan retribusi belum tentu akan berdampak pada peningkatan PAD. Peningkatan tarif dapat dipertimbangkan untuk Pajak daerah dan Retribusi Daerah yang mempunyai tingkat eksternalitas negatif yang tinggi misalnya tarif atas pajak hiburan yang menjurus kepada kemaksiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Erly Suandi, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, , Jakarta, 2000.
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Gramedia, Jakarta, 2007.
- Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *Perpajakan Teori dan Aplikasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- H.A.W. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Iskandar, Rusli K, Dalam SF. Marbun dkk. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. UII Press. Yogyakarta, 2001.
- Jajat Djuhadiat S, *Modul DPT III Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta : Departemen Keuangan-BPLK, 1993).
- James A. Black dan Dean J. Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, PT. Refika Aditama, Bandung, 1999.
- K.J Davey, *Pembiayaan Pemerintahan Daerah*, UI-Press, Jakarta, 1988.
- Machfud Sidik, Makalah Seminar Nasional, *Desentralisasi Fiskal, Kebijakan, Implementasi dan Pandangan ke Depan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*, Yogyakarta, 20 April 2002.
- Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Mashuri Maschab, *Sistem Pemerintahan Indonesia (Menurut UUD 1945)*, Bina Aksara, Jakarta, 1988.
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, edisi Indonesia, *Analisa Data Kualitatif Tentang Sumber Metode-metode Baru*, UI Press, Jakarta, 1992.
- Muqodim, *Perpajakan Buku Satu*, UII Press, yogyakarta, 1999.
- Mustaqiem, *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah*, FH UII Press, 2008.

- Panca Kurniawan & Agus Purwanto, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah di Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2006.
- Raksaka Mahi, *Tinjauan terhadap UU No. 34 Tahun 2000. Secara Teori dan Praktek serta Arah Perubahannya*, Makalah Workshop : "Dampak Pelaksanaan UU No. 34 Tahun 2000 Terhadap Dunia Usaha/ Iklim investasi dan Arah Perubahannya", Jakarta, 21 Februari 2002.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, PT. Eresco, Bandung, 1988.
- _____, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, Bandung: PT. Eresco, 1991.
- Ronny Hanijito Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1995.
- R. Santoso Brotodihardjo, SH. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* , PT. Refika Aditama, Bandung. Cet Pertama Edisi Keempat, 2003.
- Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif : Dasar-dasar dan Aplikasi*, Yayasan A3, Malang, 1990.
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2007.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Desentralisasi dalam Tata Pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda(Kebijakan dan Upaya Sepanjang Babak Akhir Kekuasaan Kolonial di Indonesia 1900-1940)*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Solly Lubis, *Politik dan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1989
- Syaukani, *Menatap Harapan Masa Depan Otonomi Daerah*, Gerbang Dayaku, Yogyakarta, 2000.
- Tjip Ismail, *Pengaturan Pajak Daerah Indonesia*, Yellow Printing, Jakarta, 2007.

Wirawan B.Ilyas & Richard Burton, *Hukum Pajak Edisi 3*, Salemba Empat, Jakarta, 2007.

Adrian Sutedi,SH,MH, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama, 2008

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pajak Sarang Burung Walet

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor